

351 7249
UTO
2 01

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

PUDJI SUSILO UTOMO
N I M : D4E000124

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2002

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh

PUDJI SUSILO UTOMO

NIM : D4E000124

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal : 29 Juni 2002

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji / Pembimbing I



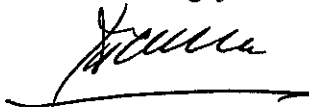
Drs. Ali Mufiz, MPA

Anggota Tim Penguji lain :



1. Drs. Sundarso, SU

Sekretaris Penguji / Pembimbing II



Prof. Drs. Y. Warella, MPA., PhD



2. Dra. M. Suryaningsih, MS

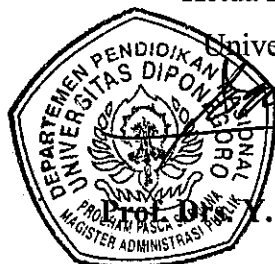
Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal 29 Juni 2002

Ketua Program Studi MAP

Universitas Diponegoro



Prof. Drs. Y. WARELLA, MPA, PhD

KATA PENGANTAR

Dengan rahmad Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka tersusunlah tesis ini dengan judul : "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK".

Pajak Bumi dan Bangunan memegang peranan yang sangat penting bagi pembangunan, untuk meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah diharapkan, peran kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi yang diberikan dari lurah desa kepada masyarakat sebagai wajib pajak sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang hal ini, maka peneliti mencoba mengemukakan tulisan ini.

Meskipun telah berupaya sesuai dengan kemampuan, namun peneliti menyadari akan segala kekurangannya dalam penyusunan tesis ini, sehingga jika pembaca atau siapa saja yang menemui kejanggalan atau kekurangan sudilah kiranya untuk menyampaikan kepada peneliti agar dapat menjadi bahan koreksi guna perbaikan selanjutnya.

Adanya saran, teguran, dan kritik yang kiranya dapat membangun sangat peneliti harapkan.

Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Ir. Eko Budiraharjo, MSc.
Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang .
2. Yang terhormat Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD
Selaku Ketua Program Magister Administrasi Publik
Universitas Diponegoro Semarang dan juga selaku
pembimbing tesis.
3. Yang terhormat Bapak Drs. H. Ali Mufiz, MPA. selaku dosen
pembimbing tesis.
4. Yang terhormat Bapak Drs. H. Sundarso, SU. selaku dosen
penguji tesis.
5. Yang terhormat Ibu Dra. M. Suryaningsih, MS. selaku
dosen penguji tesis.
6. Yang terhormat Bapak Drs. H. Yusmilarso, MA. selaku
dosen wali.
7. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Magister Administrasi
Publik Universitas Diponegoro Semarang.
8. Yang terhormat Ibu Dra. Hj. Endang Setyaningdiah selaku
Bupati Demak.

9. Yang terhormat Ibu Dra. Siti Zauharin, MM selaku Camat Karangtengah.
10. Yang terhormat Bapak dan Ibu Karyawan Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.
11. Yang tercinta orang tua kami, istri, anak, serta kakak adik dan teman, yang telah memberi dorongan dengan penuh do'a dan penuh harapan.
12. Yang terhormat semua fihak yang belum sempat peneliti sebutkan, atas segala bantuannya.

Akhirnya penulisan berharap semoga tesis yang masih jauh dari sempurna ini dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi diri penulis sendiri, bagi ilmu pengetahuan komponen akademisi bangsa maupun masyarakat umumnya, dan mungkin bagi daerah Kabupaten Demak dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan guna pelaksanaan pembangunan dan menyongsong otonomi daerah yang lebih baik, amin.

Semarang, 29 Juni 2002

Penyusun



PUDJI SUSILO UTOMO

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN-----	i
KATA PENGANTAR-----	ii
DAFTAR ISI-----	v
DAFTAR TABEL-----	vii
DAFTAR GAMBAR-----	x
RINGKASAN-----	xi
ABSTRAC-----	xii
PERNYATAAN-----	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN-----	 1
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah-----	5
C. Tujuan Penelitian-----	8
D. Kegunaan Penelitian-----	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA-----	 10
A. Landasan Teori-----	10
B. Hipotesis-----	37
 BAB III : METODE PENELITIAN-----	 39
A. Rancangan Penelitian-----	39
B. Ruang Lingkup-----	40
C. Lokasi Penelitian-----	41

D. Fenomena Yang Diamati	41
E. Jenis dan Sumber data-----	45
F. Instrumen Penelitian-----	45
G. Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel---	46
H. Teknik Pengumpulan Data-----	47
I. Teknik Analisis Data-----	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN-----	53
A. Keadaan Umum-----	53
B. Hasil Penelitian-----	59
C. Pembahasan Hasil Penelitian-----	100
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN-----	112
A. Simpulan-----	112
B. Saran-----	114

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	TARGET REALISASI PBB 5 TAHUN-----	55
Tabel IV. 2	KOMPOSISI PENDUDUK-----	56
Tabel IV. 3	KOMPOSISI KK DAN SPPT-----	57
Tabel IV. 4	TINGKAT PENDIDIKAN LURAH DESA-----	58
Tabel IV. 5	TINGKAT PENDIDIKAN CARIK DESA-----	59
Tabel IV. 6	PELAKSANAAN PROGRAM KERJA-----	60
Tabel IV. 7	KEBERHASILAN PROGRAM KERJA-----	61
Tabel IV. 8	TANGGUNG JAWAB ATAS PROGRAM KERJA---	62
Tabel IV. 9	JANJI LURAH DESA TTG PEMBANGUNAN-----	63
Tabel IV.10	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN-----	64
Tabel IV.11	DIDUKUNGNYA PEMBANGUNAN-----	65
Tabel IV.12	TERJADI RASA AMAN-----	66
Tabel IV.13	MEMECAHKAN MASALAH-----	67
Tabel IV.14	RASA SEGAN MASYARAKAT-----	68
Tabel IV.15	LURAH DESA DIJADIKAN PANUTAN-----	69
Tabel IV.16	KEJUJURAN LURAH DESA-----	70
Tabel IV.17	PERCAYA KEPADA APARAT-----	71
Tabel IV.18	PERCAYA KEPADA LURAH DESA-----	72
Tabel IV.19	TERDORONGNYA MOTIVASI-----	73
Tabel IV.20	KEMUDAHAN PEMBERIAN PELAYANAN-----	74

Tabel IV.21	KELANCARAN PELAYANAN-----	75
Tabel IV.22	KETEPATAN JANJI PELAYANAN-----	76
Tabel IV.23	PROSEDUR PELAYANAN-----	77
Tabel IV.24	KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN----	78
Tabel IV.25	KETERBUKAAN PROSEDUR-----	79
Tabel IV.26	KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN ATURAN--	80
Tabel IV.27	PELAYANAN BAGI SEMUA LAPISAN-----	81
Tabel IV.28	PERASAAN NYAMAN PELAYANAN-----	82
Tabel IV.29	KESESUAIAN WAKTU PELAYANAN-----	83
Tabel IV.30	KEWAJARAN BIAYA-----	84
Tabel IV.31	KESESUAIAN PELAYANAN DNG SASARAN-----	85
Tabel IV.32	PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN HARAPAN--	86
Tabel IV.33	MANFAAT PEMBANGUNAN-----	87
Tabel IV.34	IKUT BERPARTISIPASI PEMBANGUNAN-----	88
Tabel IV.35	FREKUENSI MEMBERI PENGARAHAN-----	89
Tabel IV.36	PENERIMAAN PENGARAHAN-----	90
Tabel IV.37	HUBUNGAN DENGAN APARAT-----	91
Tabel IV.38	HUBUNGAN DENGAN TETANGGA-----	92
Tabel IV.39	PEMAHAMAN PEMBANGUNAN-----	93
Tabel IV.40	SUMBER PEMAHAMAN PEMBANGUNAN-----	94
Tabel IV.41	ARTI PENTINGNYA PBB-----	95
Tabel IV.42	MANFAAT PBB-----	96

Tabel IV.43	KESEDIAAN MEMBANTU-----	97
Tabel IV.44	KERELAAN MEMBAYAR PBB-----	98
Tabel IV.45	BERSEDIA MEMBAYAR PBB-----	99
Tabel IV.46	KATEGORI VARIABEL KEPEMIMPINAN-----	101
Tabel IV.47	KATEGORI VARIABEL KUALITAS PELAYANAN-----	102
Tabel IV.48	KATEGORI VARIABEL MOTIVASI-----	103
Tabel IV.49	KATEGORI VARIABEL KESADARAN MASY---	104
Tabel IV.50	HUBUNGAN KEPEMIMPINAN DENGAN KESADARAN MASYARAKAT-----	105
Tabel IV.51	HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN KESADARAN MASYARAKAT-----	106
Tabel IV.52	HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN KESADARAN MASYARAKAT-----	107
Tabel IV.53	PERHITUNGAN RUMUS KENDAL-----	109

DAFTAR GAMBAR

SKEMA YANG MENDASARI PENELITIAN-----	14
KERANGKA PIKIR PELAYANAN MASYARAKAT-----	24
GAMBAR HIPOTESIS-----	38
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA-----	54

RINGKASAN

JUDUL : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT
UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK
N A M A : PUDJI SUSILO UTOMO
N I M : D4E000124
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Tesis ini bermaksud untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor yang cukup menonjol adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi.

Sistem penelitian tesis yang penulis gunakan adalah diskriptif analisis, dengan mengumpulkan data melalui observasi, questioner, interview, dan study dokumentasi. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah multi stage random sampling, jumlah sampel ada 72 responden terbagi dalam 3 desa yaitu Grogol, Karangsari, Wonowoso.

Lurah desa adalah pemimpin masyarakat, seorang pemimpin harus mengenal sifat, situasi dan kondisi yang dipimpin. Pemimpin harus mampu menciptakan kemudahan untuk merangsang kesadaran yang dipimpin, dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pelayanan masyarakat merupakan salah satu tugas lurah desa, memberi pelayanan yang berkualitas telah menjadi obsesi yang selalu ingin dicapai.

Motivasi adalah dorongan agar orang mau melakukan sesuatu dengan ikhlas dengan sebaik-baiknya.

Dari kepemimpinan yang baik, pelayanan yang berkualitas dan motivasi yang baik akan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil uji hipotesis pada taraf signifikan 5 % adalah : nilai pengaruh kepemimpinan lurah desa sebesar $1,451 > r$ tabel 0,050 pengaruh kualitas pelayanan lurah desa sebesar $1,399 > r$ tabel 0,050 dan untuk pengaruh motivasi yang diberikan dari lurah desa kepada masyarakat sebesar $1,512 > r$ tabel 0,050 adapun pengaruh kepemimpinan, kualitas pelayanan, motivasi sebesar 91,20 %. Peranserta lurah desa sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga peranserta lurah desa sangat dibutuhkan.

ABSTRACT

PUDJI SUSILO UTOMO. *Analysis on Factors Influence the Society's Awareness in Paying Land and Property Tax in Karangtengah Sub-district, Demak Regency.* Theses. Magister of Public Administration. Post Graduate Program. Diponegoro University. 2002.

This research was aimed at analyzing factors influence the society's awareness in paying Land and Property Tax in Karangtengah sub-district, Demak Regency. It was presumed that three factors among the influencing factors to the awareness are Leadership, Service quality and Motivation of the chief of the village (*lurah desa*). Therefore this research was focused on these three variables.

This is a descriptive research, collecting data through observation, questionnaires, interview and documentation study. Techniques to be employed was multi stage random sampling to take 72 respondents from the population. They were scattered in three villages, namely Grogol, Karang Sari, and Wonowoso.

The background of the research was based on the fact the *lurah desa* is also the society's leader. Therefore he should know well characters, condition and situation of those and area that he leads. With his leadership capability he should also be able to create a sound environment among his people, so that they would have a good awareness in doing their duty, and in this case is paying the Land and Property Tax.

Besides that, the *lurah desa*, as a government apparatus, is also the society's servant. The society deserves a high qualified service from the government, which in this case represented by *lurah desa*. Therefore giving a high qualified service to the society should be strived for by him, so that the people will be willing to pay the Land and Property Tax since they are satisfied with the government service.

To do his job the *lurah desa* should also has a good motivation. Motivation is a spirit to do something well. If he could motivate his people it is hoped that they will be willing to pay the tax.

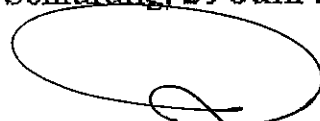
With good Leadership, high qualified Service and good Motivation it is expected that the chief of the village will be able to influence his people so that they have good Awareness to pay the Land and Property Tax. Tax is an important source for government revenue, especially in this era of region autonomy.

The hypotheses which were tested with 5% significance level shows the result that : Leadership score is 1,451, Service quality is 1.399, and Motivation is 1.512 which are all bigger than 0,050 t table. Meanwhile the influence of Leadership, Service quality and Motivation altogether to the society's Awareness to pay Land and Property Tax is 91,20%. Therefore it is concluded that the role of *lurah desa* is very important influencing his people to pay the Land and Property Tax.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Juni 2002



PUDJI SUSILO UTOMO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten/ Kota diharapkan dapat mencari sumber kekayaan yang berpotensi dari wilayahnya sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber daya yang sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunannya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu penyederhanaan dari pungutan pajak-pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia sejak dahulu.

Sejarah pungutan-pungutan di Indonesia diawali dari pungutan/upeti yang dilaksanakan pada jaman kerajaan. Upeti tersebut dipungut dari rakyat untuk kegiatan kerajaan. Kemudian dilanjutkan pada jaman penjajahan Inggris di Indonesia, pungutan pajak tersebut diberi nama *Landrent*

ditetapkan oleh pemerintah penjajah pada awal abad XIX tepatnya sekitar tahun 1811-1814 saat itu pemerintah kolonial Inggris dipimpin oleh Sir Thomas Stanford Raffles.

Selanjutnya oleh pemerintah penjajah Belanda disebut *Landrete*. (Sumber Sumber Panduan PBB Dirjen Pajak)

Setelah Negara Indonesia merdeka maka *Landrete* tersebut diganti dengan sebutan Pajak Bumi (Undang-undang Nomor 11 Tahun 1951).

Melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 diberlakukan Pajak Hasil Bumi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor B.M.P.P.U.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 disebut Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Mulai tanggal 31 Desember 1985 setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 maka IPEDA diganti dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Namun dalam perkembangan selanjutnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut mengalami perubahan yaitu dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Sumber Panduan PBB Dirjen Pajak)

Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut oleh pemerintah diharapkan mampu mendukung dana pembangunan dan dapat mengurangi beban pinjaman luar negeri. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Tujuan utama Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan serta meningkatkan kemandirian daerah dari potensi yang ada. (Sumber Panduan PBB Dirjen Pajak).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia sangat penting, karena sebagian penerimaan Negara, Propinsi, maupun Kabupaten/ Kota adalah dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan jika dilaksanakan semakin cepat maka hasilnya semakin baik. Untuk meningkatkan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dibutuhkan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat sebagai wajib pajak.

Sedangkan kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar.

Pengaruh dari dalam adalah dari diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan pengaruh dari luar diantaranya adalah dari :

1. Kepemimpinan.
2. Kualitas pelayanan.
3. Motivasi.

Kecamatan Karangtengah merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Demak.

Sedangkan Kabupaten Demak adalah sebuah wilayah yang terjepit dengan beberapa wilayah Kabupaten dan Kota yang lebih kaya serta maju tingkat kemandiriannya antara lain Kota Semarang, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.

Wilayah-wilayah tersebut sangat mempengaruhi kehidupan di Kabupaten Demak dan sekitarnya termasuk didalamnya adalah wilayah Kecamatan Karangtengah.

Wilayah Kecamatan Karangtengah sebagian besar merupakan lahan persawahan. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sebagian besar adalah dari lahan pertanian atau bercocok tanam dan sebagian lagi sebagai buruh pabrik dan lainnya.

Peneliti sengaja mengamati masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten

Demak, karena peneliti ingin tahu sejauh mana faktor-faktor kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi dari lurah desa se Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Dari faktor-faktor tersebut di atas dapat menjadi penggerak maupun pendorong bagi masyarakat sebagai wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Lurah desa didalam menjalankan tugasnya sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari unsur manajemen publik, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Lurah desa merupakan tokoh yang disegani oleh masyarakat. Kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi lurah desa diharapkan dapat memberi pengaruh yang positif terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Banyak faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Penulis hanya memfokuskan penelitiannya pada masalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi yang peneliti anggap sebagai faktor yang dominan dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahannya dapat identifikasi sebagai berikut :

- a. Dari proses dilantiknya seseorang menjadi lurah desa berasal dari pemilihan, sehingga lurah desa adalah orang yang disegani dan mempunyai pengaruh kepada masyarakat, hal ini merupakan modal dasar untuk memimpin masyarakat.

Namun karena pendidikan yang dimiliki oleh lurah desa di Kecamatan Karangtengah sebagian besar masih kurang, sehingga modal yang dimiliki masih belum dapat digunakan secara maksimal.

- b. Pada umumnya sistem pelayanan kepada masyarakat desa di Kecamatan Karangtengah masih dilaksanakan secara tradisi. Disamping itu masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pemerintah banyak yang belum mengetahui aturan pemberian pelayanan, sehingga menyulitkan prosedur/tata cara pelayanan.

- c. Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat sangat heterogen, sehingga menjadikan tantangan bagi lurah desa dalam memberikan motivasi kepada masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan target.
- d. Mengingat pentingnya pelaksanaan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, maka modal dasar yang dimiliki oleh lurah desa yaitu kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan pemberian motivasi sehingga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Perumusan masalah

Sedangkan perumusan masalah dari tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah ada pengaruh antara kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- b. Apakah ada pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

- c. Apakah ada pengaruh motivasi/dorongan terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- d. Bagaimana pengaruh dari ketiga faktor tersebut yaitu kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi/dorongan terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan lurah desa terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan lurah desa terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi/dorongan dari lurah desa terhadap kesadaran masyarakat untuk

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi/dorongan dari lurah desa terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian tesis ini diharapkan akan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Berguna untuk menambah pengetahuan bagi peneliti terutama yang berkaitan dengan permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
2. Berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat pemerintah atau pembaca umumnya terutama dalam rangka mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori yang mendasari penelitian :

Teori merupakan suatu pokok pemikiran dari permasalahan yang akan diteliti.

Teori menurut Kerlinger adalah sebagai berikut :

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep” (Masri dan Sofian, 1995 : 37).

Sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk melaksanakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan kesadaran masyarakat.

Sedangkan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penarikan ditingkat desa adalah lurah desa.

Memimpin, memberi pelayanan dan memotivasi kepada masyarakat di desa merupakan bagian tugas lurah desa.

Dari kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi yang diberikan oleh lurah desa dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam membahas teori yang mendasari penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat maupun teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Taliziduhu dalam tulisannya yang berjudul *"Prospek Pemerintahan Desa pada Milenium Ketiga"* menyebutkan bahwa banyak tugas lurah/kepala desa yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat antara lain jika lurah desa dapat memberikan :

1. Rasa percaya
2. Sistem pemerintahan
3. Layanan civil
4. Pelaksanaan pembangunan

(Jurnal Ilmu Pemerintahan VI, 1997 : 8)

Menurut Basu menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas aparat pemerintahan desa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pelayanan

2. Perlindungan
3. Pemeliharaan
4. Pengusahaan
5. Pengembangan

(Jurnal Ilmu Pemerintahan III, 1996 : 69)

Menurut Gibson menyebutkan bahwa keberhasilan kerja/tugas dipengaruhi oleh :

1. Perilaku :
 - Kepemimpinan
 - Motivasi
2. Struktur :
 - Desain organisasi
 - Desain kerja
3. Proses :
 - Proses komunikasi
 - Proses sosialisasi
 - Proses pengambilan keputusan

Sedangkan menurut pendapat Mustopadidjaja dalam tulisannya yang berjudul "*Format Pemerintahan Menghadapi Abad 21*" menyebutkan bahwa untuk mengaktualisasikan dan mengatasi berbagai kendala bagi perkembangan, aktivitas dan partisipasi guna menggerakkan masyarakat, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pemberdayaan
2. Pelayanan
3. Partisipasi
4. Kemitraan

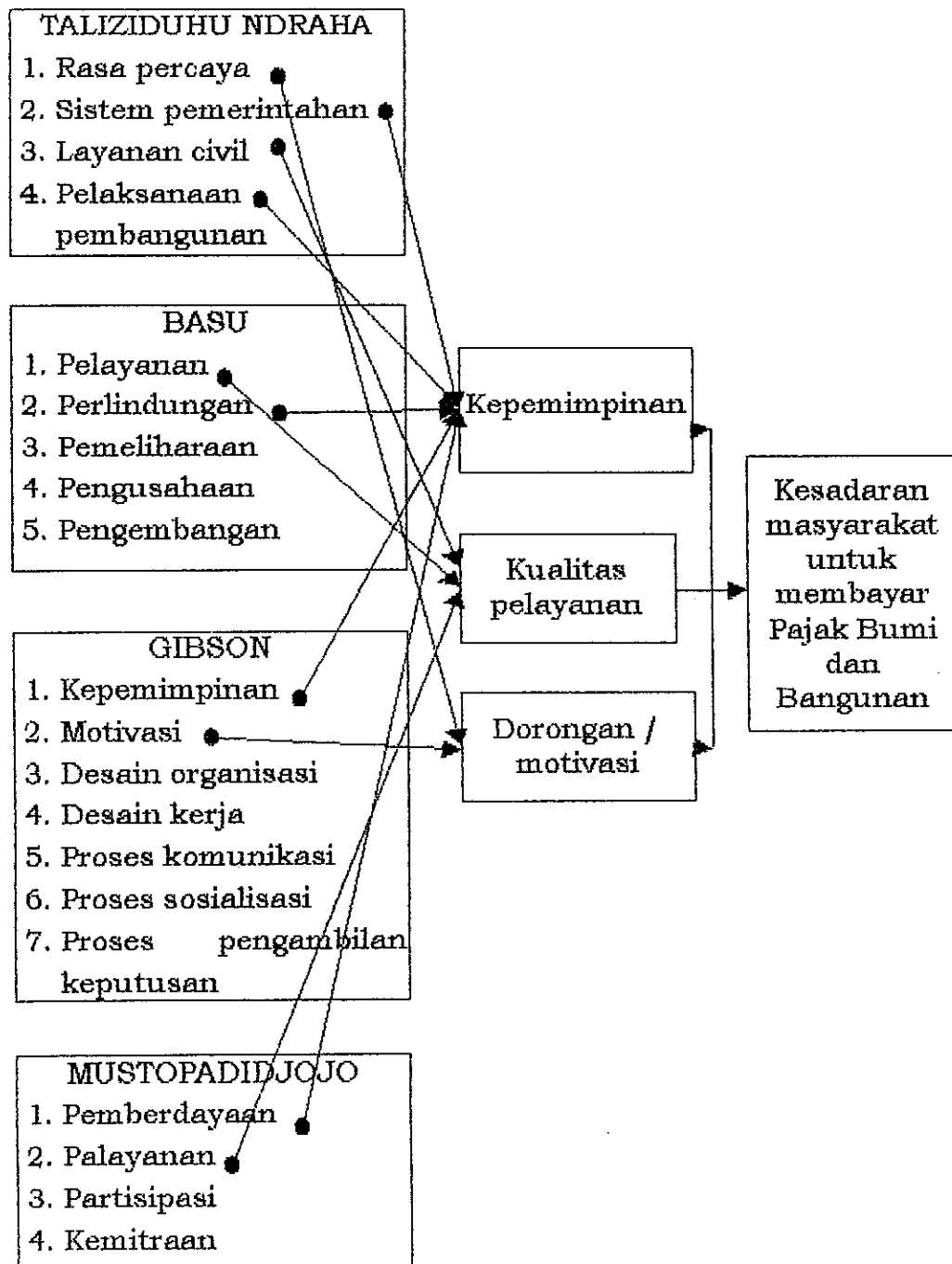
(Jurnal Ilmu Pemerintahan VI, 1997 : 8)

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat.

Sedangkan pokok penelitian ini berfokus pada masalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, motivasi.

GAMBAR 1 :

TEORI YANG MENDASARI PENELITIAN



Berdasarkan teori dan pendapat tersebut di atas, maka penulis akan membagi variabel penelitian sebagai berikut :

Kepemimpinan (variabel bebas X1)

Kualitas pelayanan (variabel bebas X2)

Motivasi (variabel bebas X3)

Kesadaran masyarakat (variabel terikat Y)

2. Konsep-Konsep Penelitian.

a. Kepemimpinan.

Kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan erat kaitannya dengan manajemen publik, sedangkan manajemen berasal dari kata to "*manage*" yang artinya mengatur.

Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dalam batas kebijakan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Di Indonesia masih terdapat dualisme pengertian tentang administrasi.

Disatu pihak administrasi diartikan secara luas yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dilain pihak administrasi diartikan secara sempit yaitu administrasi adalah ketatausahaan yang sesungguhnya merupakan bagian kecil dari kegiatan operasional.

Manajemen menurut Terry (1977) yaitu :

"Management is the performance of conceiving and achieving desired results by means of group efforts consisting of utilizing human talents and resources (manajemen adalah penyelenggaraan usaha penyusunan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan upaya-upaya kelompok, terdiri atas penggunaan bakat-bakat dan sumber daya manusia)" (Kartini Kartono, 1994:148).

Manajemen menurut Siagian (1987 : 5) :

"Menajemen adalah kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain, dengan demikian manajemen merupakan bagian inti dari administrasi, karena manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi".

Seorang pemimpin harus mengenal sifat, situasi dan kondisi, yang dipimpin (bawahan), selanjutnya mengembangkan sifatnya sendiri kearah kelompok yang dipimpin.

Pemimpin harus mampu menciptakan kemudahan untuk merangsang kesadaran dari yang dipimpin yaitu bawahannya.

Seorang pemimpin dalam organisasi pemerintahan mempunyai tugas untuk mengatur dan menggerakkan sejumlah orang serta mempunyai berbagai sikap tingkah laku yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pemimpin dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi merupakan pekerjaan yang rumit, salah satu kerumitan tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya orang yang terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Kepemimpinan menurut Davis (1951) ialah :

"Organization is any group of individuals that is working to ward some common end under leadership"
(Organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan). (Sutarto, 1991 : 23).

Adapun kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard adalah sebagai berikut :

- a. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik.
- b. Seorang pemim,pin harus bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan (Wahjosumidjo 1992 : 117)

Kepemimpinan menurut Ki Hadjar Dewantoro adalah sebagai berikut :

Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangunkarso, Tutwuri handayani.

Dari falsafat tersebut dapat penulis simpulkan seperti di bawah ini :

Seorang pemimpin harus mampu lewat sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya sebagai anutan dan dapat dijadikan ikutan bagi orang yang dipimpin atau bawahan.

Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang yang dipimpin atau bawahan.

Seorang pemimpin harus mampu mendorong agar menuju kedepan dan sanggup bertanggung jawab bagi orang yang dipimpinnya.

Kepemimpinan menurut Koontz et.al (1992 : 77) adalah sebagai berikut :

Pemimpin (leading) adalah proses mempengaruhi orang-orang agar mereka mau berusaha kerja secara antusias untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Pemimpin terutama berkaitan dengan aspek antar pribadi dalam mengelola. Semua manajer akan sepakat bahwa masalah mereka yang paling penting berasal dari manusianya, keinginan dan sikap mereka,

perilaku mereka sebagai individu dan dalam kelompok, serta kebutuhan akan adanya manajer yang efektif yang juga merupakan pemimpin yang efektif. Karena kepemimpinan menyiratkan adanya kepengikutan (followership) dan orang - orang cenderung mengikuti mereka yang dipandang dapat menyediakan sarana pemenuhan kebutuhan, harapan, dan hasrat mereka, maka dapat dimengerti bahwa memimpin mencakup motivasi, gaya, dan pendekatan kepemimpinan, serta komunikasi.

Kepemimpinan menurut Pamudji (1995 : 135)

menyebutkan :

Atas dasar ini semua maka dalam rangka menggerakkan orang-orang pemimpin wajib melakukan motivasi. Dalam hubungan inilah fungsi kepemimpinan pemerintahan mempunyai tugas kewajiban memotivasi yaitu usaha memberikan motif-motif (dorongan-dorongan) agar orang-orang mau bekerja/bergerak dengan ikhlas dan suka rela untuk mencapai tujuan secara sebaik-baiknya (seefisien mungkin). Motif atau yang dalam bahasa asing disebut motive adalah sesuatu seperti kebutuhan atau keinginan, yang mendorong atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan gerak.

Teori pribadi dan situasi yang peneliti kutip dari

Pamudji (1995 : 147) adalah sebagai berikut :

Teori pribadi dan situasi (personal-situational theory) pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan produk dari terkaitnya tiga faktor yaitu :

1. Perangai (sifat-sifat) pribadi pemimpin;
2. Sifat dari kelompok anggota-anggotanya;
3. Kejadian-kejadian (atau masalah-masalah) yang dihadapi oleh kelompok.

Oleh karenanya kepemimpinan dalam pemerintahan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan

dari konsep dan teori tentang kepemimpinan pada umumnya antara lain :

1) Teori Sifat Kepemimpinan

Teori ini berpijak pada asumsi bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat yang dimiliki (sifat bawaan) baik fisik maupun psikis.

2) Teori Situasional

Teori ini beranggapan bahwa situasilah yang menyebabkan keberhasilan kepemimpinan seseorang, bukan ditentukan oleh sifat-sifat yang dimilikinya.

Menurut teori ini, kepemimpinan ditentukan oleh banyak faktor, antara lain :

Persyaratan tugas pekerjaan, kebutuhan dan sifat dari pengikutnya, serta lingkungan dimana berada, disamping itu pemimpin harus mengenal diri dari kelompoknya.

Kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintahan.

Lurah desa adalah seorang pemimpin organisasi pemerintah tingkat desa, proses pengangkatan lurah desa dilaksanakan melalui pemilihan langsung.

Dari proses pemilihannya tersebut dapat diketahui bahwa lurah desa adalah orang yang disegani, dihormati, dipatuhi dan dapat dijadikan penutan serta mempunyai pengaruh di desanya. Hal ini merupakan modal dasar untuk memimpin masyarakat.

Berdasarkan teori yang dijabarkan di atas, maka dapat diperoleh indikator-indikator tentang konsep kepemimpinan lurah desa adalah sebagai berikut :

- 1). Lurah desa yang baik adalah lurah desa yang bertanggung jawab.
- 2). Lurah desa yang baik adalah lurah desa yang dapat melindungi warganya.
- 3). Lurah desa yang baik adalah lurah desa yang dapat dianut.

b. Kualitas Pelayanan

Telah kita ketahui di atas bahwa dari kepemimpinan dapat menggerakkan wajib pajak, demikian juga dari kualitas pelayanan diharap dapat menjadi alat untuk memperlancar birokrasi sehingga mempengaruhi kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

Kualitas pelayan yang bermutu dapat mempertinggi rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah .

Kualitas pelayanan adalah suatu kemampuan yang menjadi harapan oleh seseorang dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di bidang pelayanan.

Kualitas pelayanan erat sekali hubungannya dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Seperti diuraikan oleh Warella dalam pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar adalah :

"Salah satu misi utamanya sebagai *"the guardian of public interest"* dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan ini telah menjadi obsesi yang selalu ingin dicapai" (Warella, 1997 : 41)

Sedangkan pelayanan menurut Robert H Simons dan Eugene P. Dvorin adalah sebagai berikut :

"Sistem nilai layanan disebut Civil service, melalui civil servis hak-hak rakyat, penduduk, konsumen, lingkungan, dan setiap warga negara dipenuhi secara adil, merata, tanpa pandang bulu". (Taliziduhu, 1996 : 69)

Menurut pendapat Vijay Sathe (1985) pelayanan adalah:

"bersama-sama dengan sisten organisasi dan kepemimpinan budaya mempengaruhi performance organisasi, jika diterapkan pada pemerintahan maka dapat dikatakan bahwa kualitas dan produktivitas pelayanan kepada masyarakat bergantung antara lain pada budaya pemerintah dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan" (Taliziduhu, 1996 : 69)

Sedang menurut pendapat Edgar (1991 : 45)

menyebutkan :

"Kadang-kadang orang bekerja karena uang, tetapi penelitian-penelitian membuktikan kekeliruan itu. Sudah jelas bahwa orang ingin mempergunakan kemampuan mereka, tetapi kadang-kadang menolak suatu pekerjaan yang merupakan tantangan. Orang kehilangan motivasi dan perhatian terhadap pekerjaan, tetapi mutu pekerjaan mereka tetap tinggi".

Menurut pendapat Nainggolan (1984 : 23)

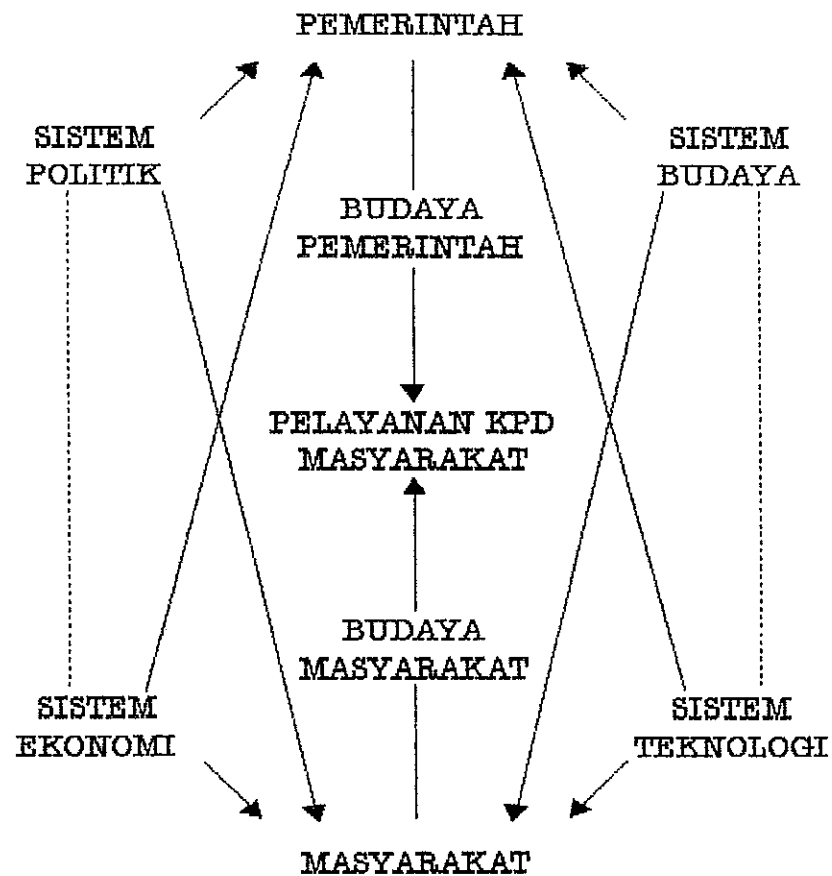
menyebutkan :

"Dalam rangka mencapai tujuan Nasional diperlukan adanya pegawai yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat".

Menurut Ross A Webber (1969) adalah :

Manajemen pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh empat sistem : sistem teknologi, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya, untuk membahas permasalahan seperti tersebut di atas dapat diperhatikan model kerangka pikir di bawah ini :

Gambar 2 :



(Sumber : Weber Ross A, *Cultur and Management*, Richard D. Irwin, Inc, Home wood, III, 1969, p 5. Dikutip dari Taliziduhu Nhraha, *Budaya Pemerintahan dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Kepada Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi ketiga, 1996, p 63)

Dari gambar tersebut di atas dapat dideduksikan pada pokok bahasan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan suatu hak yang dikenal dengan hak bawaan atau hak asasi.

Hak bawaan antara lain ialah hak untuk hidup, mengejar kebahagiaan, mendapat perlindungan dan keamanan, kebebasan menentukan pilihan, dan lain-lain.

Lembaga yang berkewajiban memenuhi hak tersebut adalah pemerintah. Kegiatan pemerintah untuk memenuhi hak tersebut dinamakan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat.

Pemerintah desa se Kecamatan Karangtengah perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak yaitu lurah desa yang dibantu perangkat memungut pajak kemudian medistribusikan hasil pungutan pajaknya.

- 2) Pelayanan pemerintah kepada masyarakat bergantung pada berbagai faktor dan berdampak terhadap berbagai bidang, antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi.

Budaya pemerintah yang terbentuk tergantung pada bagaimana dan sejauh mana pemerintah desa di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak berhasil mengantisipasi tuntutan dan tekanan dari kekuatan bagaimana perintah dari atasan,

koordinasi setingkat, perintah terhadap bawahan, dan kekuatan masyarakat.

Kualitas pelayanan adalah suatu kemampuan yang dapat dicapai oleh seseorang dalam melakukan kegiatan/pekerjaan.

Kualitas pelayanan pemerintahan didesa kental hubungannya dengan pelayanan umum.

Pelayanan pemerintah kepada masyarakat bergantung kepada berbagai faktor dan berdampak terhadap berbagai bidang, antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi.

Dengan demikian teori yang diuraikan di atas dapat dijabarkan dalam indikator sebagai berikut :

- 1). Kesederhanaan dan ketepatan waktu pelayanan
- 2). Kejelasan, kepastian dan keterbukaan dalam pelaksanaan pelayanan
- 3). Keamanan dan keadilan dalam pemberian pelayanan
- 4). Efisiensi dan ekonomis.

c. Motivasi

Motivasi adalah dorongan agar orang mau melakukan sesuatu dengan ikhlas dan sebaik-baiknya.

Motivasi dari lurah desa kepada masyarakat, biasanya akan cepat diterima, karena lurah desa adalah orang yang dekat dengan masyarakat.

Pengertian motivasi ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para ahli sesuai dengan tempat dan keadaan masing-masing, namun pada hakekatnya terdapat kesamaan prinsip.

Pendapat Barelson dan Steiner adalah :

"a motive is an inner state that energizes or move (hence motivation), and that directs or channels behavior to ward goals" (motivasi adalah suatu usaha sadar untuk mempengaruhi perilaku seseorang agar supaya mengarah tercapainya tujuan organisasi) (Wahjosumijo, 1987 : 177).

Untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka motivasi merupakan masalah yang sangat penting guna mencapai tujuan bersama.

Sedangkan motivasi menurut Sondang (1987 : 128) adalah sebagai berikut :

"Keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis".

Menurut Henry Simamora (1997 : 557) adalah sebagai berikut :

"Kepercayaan adalah prasyarat yang perlu untuk sifat-sifat motivasional dari sisten kompensasi".

Teori motivasi dari Abraham Maslow menerangkan bahwa pada dasarnya manusia berusaha memenuhi kebutuhan pokok sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

Disamping itu Maslow memberikan lima jenjang kebutuhan, kelima jenjang.

Menurut konsep Maslow tersebut dari yang terendah sampai tingkat yang tertinggi adalah sebagai berikut :

- 1) Physiological needs (kebutuhan mempertahankan hidup)
- 2) Security needs (kebutuhan rasa aman)
- 3) Social needs (kebutuhan sosial)
- 4) Esteem needs (kebutuhan penghargaan)
- 5) Self-actualization (kebutuhan mempertinggi kepastian)

Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang diakui oleh lingkungan kerjanya, diantaranya meliputi :

- Hubungan harmonis dengan kawan sejawat.

- Mendapatkan kesempatan didalam bermasyarakat.
- Hubungan yang harmonis dengan pimpinannya.
- Hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Hal ini tidak terlepas dari suatu kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan individu.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan bukan merupakan suatu kewajiban saja.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu kebutuhan masyarakat.

Sebagian biaya pembangunan adalah berasal dari penarikan pajak ini, sedangkan pembangunan merupakan kebutuhan masyarakat.

Jadi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu kebutuhan masyarakat.

2. Taat kepada umaro (pemerintah) merupakan sebagian dari iman, dari itu akan mendapatkan pahala.

Sedangkan pahala merupakan kebutuhan umat muslim (sebagian besar penduduk Kecamatan Karangtengah umat muslim).

Jadi membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagian taat kepada umaro yang akan mendapat pahala dan merupakan kebutuhan umat muslim.

Berdasarkan uraian dan teori di atas, maka dapat dijabarkan dalam indikator-indikator sebagai berikut :

- 1). Dengan motivasi maka masyarakat dapat tergerak.
- 2). Dapat terpenuhi kebutuhan masyarakat.

d. Kesadaran masyarakat

Untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, maka lurah desa perlu mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai tanggungannya.

Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak mudah, karena hal tersebut berkaitan dengan psycologis.

Kesadaran menurut Gozali (1976 : 20) adalah :

“Kesadaran adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diuraikan bahwa kesadaran merupakan ikatan jiwa baik dalam bentuk sikap maupun perilaku, dimana seseorang dengan rela melakukan tindakan memenuhi kewajiban dalam hidup bermasyarakat.

Kesadaran masyarakat menurut Djamahudin (1985 : 30) adalah :

Kesadaran dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- 1). Knowledge (pengetahuan) yaitu pengetahuan tentang disebut lembaga-lembaga dan program-program yang akan dijalankan.
- 2). Attitude (sikap) yaitu meliputi tanggapan emosional pernyataan senang, tidak senang, pernyataan tentang kepercayaan dan tanggapan untuk bertindak.
- 3). Practice (perilaku) yaitu pernyataan perilaku seperti ramah, hangat, agresif maupun apatis terhadap suatu program.

Sedangkan menurut Men Rongers mengemukakan bahwa :

Tumbuhnya kesadaran ada lima tahapan ialah :

- 1). Tahapan awarnes, atau kesadaran adanya sesuatu;
- 2). Tahapan Interest, atau tumbuhnya minat untuk mengetahui lebih lanjut;
- 3). Tahapan Evaluasi, melakukan penilaian pengukuran mengenai inovasi yang disampaikan;
- 4). Tahapan Trial, atau mencoba inovasi baru;
- 5). Tahapan adaptation/adopsi (menerima, menerapkan dan melaksanakan) inovasi berdasarkan keberhasilan yang dicapai dalam selama percobaan yang dilaksanakan (Scool, 81 : 24).

Istilah kesadaran dengan keikutsertaan, keterlibatan khususnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak jauh berbeda.

Keterlibatan menurut Keit Devis (1977 : 22) diartikan sebagai berikut :

“Keterlibatan secara mental maupun emosional seseorang dalam situasi kelompok yang menggairahkan, memberi sokongan kepada tercapainya tujuan kelompok serta mengambil bagian pertanggung jawaban”.

Dengan ini dapat diketahui bahwa keikutsertaan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan berarti telah ikut serta pula dalam pelaksanaan pembangunan.

Kesadaran masyarakat berlangsung melalui tahapan, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijadikan beberapa tahap yaitu :

- 1). Wajib pajak harus tahu arti pentingnya dan fungsi dari pada pajak.
- 2). Mengadakan penilaian dan pengukuran terhadap inovasi yang disampaikan.
- 3). Mencoba menerima dan melaksanakan dengan sadar pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tergantung pada masing-masing perilaku wajib pajak maupun aparat pelaksana dan pemungut pajak.

Dari teori dan uraian tentang motivasi di atas dapat dijabarkan dalam indikator sebagai berikut :

- 1). Tingkat kesadaran masyarakat dapat di lihat dari pengetahuan masyarakat.
- 2). Tingkat kesadaran masyarakat dapat di lihat dari sikap dan perilaku masyarakat.

3. Hubungan antar variabel.

- a. Pengaruh variabel kepemimpinan lurah desa terhadap variabel kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kepemimpinan adalah suatu cara untuk memimpin dimana pemimpin dapat memberi suatu motivasi kepada yang dipimpin agar dapat tercapainya tujuan organisasi.

Kepemimpinan dapat mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerja sama sehingga mencapai tujuan yaitu mempengaruhi kesadaran masyarakat sebagai

wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Dengan kata lain dari kepemimpinan dapat menjadi sumber penggerak kesadaran masyarakat.

Dari permasalahan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap variabel kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan bangunan.

Memberi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat telah menjadi obsesi yang dicapai. Pencapaian obsesi tersebut akan mempunyai dampak kepercayaan, kemudian masyarakat akan menerima dan menganut apa yang diinginkan pemerintah. Hal ini akan memudahkan pelaksanaan tugas aparat.

Kualitas pelayanan yang baik dan bermutu dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat sebagai wajib pajak terhadap aparat pemerintah, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Atas dasar itu semua, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

- c. Pengaruh variabel motivasi terhadap variabel kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dorongan/motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk mempengaruhi kesadaran seseorang.

Dorongan/motivasi mempunyai dua kekuatan yaitu yang berasal dari diri sendiri, berupa dorongan untuk meraih tujuan dan yang berasal dari luar yaitu dari orang lain sehingga mempengaruhi orang-orang tersebut, serta berupa harapan untuk mencapai tujuan.

Motivasi yang diberikan diharap dapat diserap/diterima secara positif. Hal ini akan memperingan tugas lurah desa untuk mempengaruhi masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa motivasi sangat berpengaruh terhadap

kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan

- d. Pengaruh variabel kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi terhadap variabel kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kepemimpinan, kualitas pelayanan, motivasi besar sekali pengaruhnya terhadap kesadaran masyarakat.

Lurah desa adalah pemimpin masyarakat didesanya sehingga lurah desa harus mampu memberi menggerakkan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Memberi pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas lurah desa. Jika pelaksanaan pelayanan dilaksanakan dengan baik maka masyarakat akan percaya pada pemerintahan desa, hal tersebut akan mempengaruhi kesadaran masyarakat.

Memberi motivasi dan dapat diterima akan memudahkan lurah desa dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kepemimpinan, kualitas pelayanan, motivasi sangat

berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

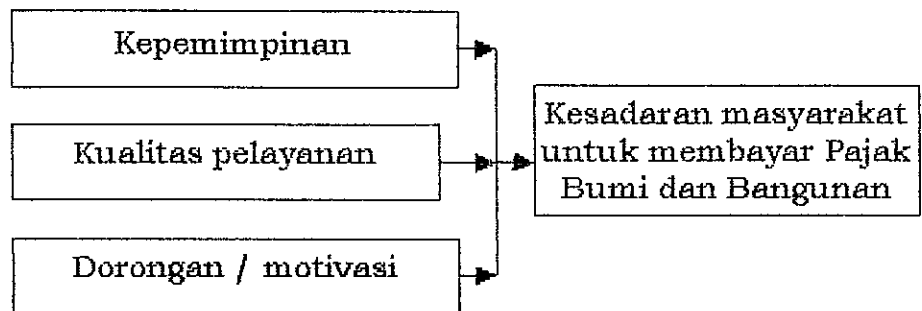
B. Hipotesis

Penelitian dengan permasalahan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ini, peneliti akan memberikan sedikit hipotesis dari pokok permasalahan dan bahasan yang telah diuraikan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat khususnya bagi wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Ada hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kesadaran masyarakat khususnya bagi wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Ada hubungan yang signifikan antara motivasi terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hipotesis di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 3 :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Untuk menyelesaikan penulisan tesis ini penulis akan melakukan beberapa metode yang akan dipakai yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini dilakukan agar peneliti dapat mengenal, mengetahui, dan memahami permasalahan serta hambatan yang ada dalam pelaksanaan dilapangan dengan lebih jelas.

Metode pendekatan menurut Sugiyono (2001 : 3), adalah sebagai berikut :

"Penelitian menurut pendekatannya, dapat dikelompokkan menjadi penelitian survey, *ex post facto*, eksperimen, naturalistik, *policy research* (penelitian policy), *action research* (penelitian tindakan), evaluasi, dan sejarah".

Mengkaji permasalahan dan pendapat tersebut di atas, maka di dalam melaksanakan penelitian di lapangan guna penulisan tesis ini, peneliti akan menggunakan metode pendekatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan tesis ini bersifat diskriptif didalam penelitiannya akan digunakan sistem antara lain :

- a. Penelitian dilaksanakan melalui survai langsung kelokasi penelitian. Proses penelitian survai yang akan digunakan adalah mengumpulkan informasi yang didapat dari responden.
- b. Penelitian dengan mempelajari buku, aturan, literatur, dan lain-lain yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini berkisar dalam lingkup Manajemen Administrasi Publik, dengan pokok bahasan "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak".

Didalam penelitian ini penulis akan membatasi pembahasan masalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, motivasi yang berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan permasalahan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dilaksanakan di desa-desa sewilayah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

D. Fenomena Yang Diamati

1. Definisi konsep

Definisi konsep yang dipakai pada dasarnya hanya mendefinisikan variabel-variabel yang ada dengan mengacu kerangka pikir yang telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun definisi konsep penelitian yang digunakan untuk penulisan tesis ini adalah :

a. Variabel bebas (X 1) Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu cara untuk mempengaruhi dan menggerakkan seorang atau lebih agar dapat tercapainya tujuan organisasi.

b. Variabel bebas (X 2) Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan adalah suatu kemampuan kerja di bidang pelayanan yang baik, dari kualitasnya dapat mempengaruhi rasa percaya terhadap pemerintahan.

c. Variabel bebas (X 3) Motivasi

Motivasi adalah suatu cara atau usaha untuk mendorong seseorang agar mau melakukan sesuai dengan yang diinginkan sehingga dapat tercapai tujuannya.

d. Variabel terikat (Y) Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah suatu tindakan masyarakat mau melaksanakan (membayar Pajak Bumi dan Bangunan) dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kepemimpinan, kualitas pelayanan, motivasi.

2. Definisi operasional

Dalam definisi operasional ini penulis akan merinci kegiatan penelitian dalam mengukur variabel-variabel dengan indikatornya.

Adapun indikator yang diajukan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Variabel bebas

1). Variabel bebas (X1) Kepemimpinan

a). Pemimpin yang bertanggung jawab

- Berhasilnya program lurah desa.

- Terlaksananya pembangunan.
- Didukungnya pelaksanaan pembangunan.

b). Dapat melindungi masyarakat

- Terjadinya rasa aman.
- Dapat memecahkan masalah masyarakat

c). Dapat dipatuhi

- Lurah desa disegani masyarakat.
- Perilaku lurah desa dianut masyarakat.
- Masyarakat percaya terhadap lurah desa.
- Dapat mempengaruhi masyarakat.

2). Variabel bebas (X2) Kualitas pelayanan

a). Kesederhanaan dan ketepatan waktu

- Kemudahan pelayanan
- Kelancaran pelayanan
- Ketepatan waktu pelayanan

b). Kejelasan, kepastian dan keterbukaan

- Prosedur pelayanan
- Persyaratan pelayanan
- Keterbukaan pelayanan

c). Keamanan dan keadilan

- Kepastian hukum
- Perlakuan pelayanan yang merata

- Kenyamanan pelayanan

d). Efisiensi dan ekonomis

- Kecepatan pelayanan
- Biaya pelayanan
- Pencapaian sasaran

3). Variabel bebas (X3) Motivasi/ dorongan

a). Masyarakat dapat tergerak

- Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan
- Melaksanakan diarahkan arti lurah desa

b). Terpenuhinya kebutuhan

- Terjalin hubungan harmonis dengan aparat desa
- Terjalin hubungan harmonis dengan tetangga

b. Variabel terikat

Variabel terikat (Y) Kesadaran masyarakat

a). Pengetahuan masyarakat

- Tahu akan arti pentingnya pembangunan
- Masyarakat tahu akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan

b). Sikap dan perilaku

- Membantu tugas pemerintahan desa

- Melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

E. Jenis dan Sumber Data

- Data primer

Jenis dan sumber data primer dalam penelitian ini, berasal dari survai yang dilaksanakan oleh peneliti sehingga mendapatkan data yang diharapkan dan sesuai dengan judul penelitian yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

- Data skunder

Jenis dan sumber data skunder ini berasal dari perpustakaan yaitu peneliti membaca buku, literatur, karangan ilmiah, dan lain lain yang dapat peneliti gunakan.

F. Instrumen Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini maka digunakan beberapa instrumen penelitian antara lain :

1. Kuesioner

2. Interview
3. Studi dokumentasi

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah semua individu atau obyek yang menjadi pokok masalah, sedang sampel adalah contoh, representant atau wakil dari suatu populasi. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian representatif dari populasi.

Dalam penelitian tesis ini populasi penelitiannya adalah masyarakat wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Mengingat jumlah masyarakat wajib pajak di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terlalu banyak, maka hanya sebagian populasi saja yang akan diteliti sebagai sampel.

Dari populasi sampel tersebut dan diharapkan dapat mewakili populasi keseluruhan yang ada yaitu seluruh masyarakat sebagai wajib pajak.

Menurut Supranto (2000 : 124) menyebutkan sebagai berikut :

“Sampling acak sederhana ialah untuk menarik suatu kesimpulan tentang suatu populasi yang sedang diteliti(seluruh petani,seluruh perguruan tinggi swasta, seluruh tanaman, seluruh bibit ikan), kesimpulan mana

didasarkan atas informasi atau data yang diperoleh dari penelitian sampel yang dipilih secara acak dari populasi tersebut”.

Sedangkan kendala yang dialami adalah banyaknya elemen dalam sampel.

Dari permasalahan tersebut di atas maka peneliti akan mengambil sampel dengan menggunakan tehnik Multi Stage Random Sampling (Pengambilan Sampel Gugus Bertahap) dengan cara sebagai berikut .:

Wilayah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terdiri dari 17 desa, sampel yang diambil adalah 3 desa sehingga dilaksanakan lotre sebagai desa wilayah sampel.

Dari 3 desa tersebut akan diambil lagi untuk masing-masing desa 2 RW dari desa terpilih sebagai sampel.

Dari 2 RW tersebut akan diambil lagi untuk masing-masing 2 RT, kemudian masing-masing RT diambil 6 wajib pajak sebagai sampel terpilih.

Dengan demikian peneliti akan mendapat 72 orang wajib pajak sebagai elemen sampel secara acak sederhana.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini akan digunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi yaitu melaksanakan penelitian dengan mengamati obyek yang diteliti.
2. Kuesioner yaitu memberi pertanyaan secara tertulis.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini dilaksanakan pada saat melaksanakan survei. Kuesioner merupakan salah satu teknik dari penelitian ini, kuesioner tersebut akan diberikan kepada responden yaitu masyarakat sebagai wajib pajak.

Menurut Masri Singarambun dan Sofian Effendi (1995 : 3) sebagai berikut :

"Penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok".

Sedangkan menurut Kartini Kartono (1988 :20) adalah :

Kuesioner adalah suatu tehnik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan berupa formulir-formulir, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek-subyek untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan seperlunya.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kuesioner sangat penting digunakan dalam penelitian ini, sedangkan tujuan dari pembuatan kuesioner dalam penelitian ini adalah :

- a. Memperoleh data yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah.
 - b. Memperoleh informasi yang ada hubungannya dengan judul serta mendapatkan rehabilitasi dan validitas yang setinggi mungkin.
3. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden.

Disamping melaksanakan penelitian dengan menggunakan kuesioner, peneliti juga akan mengadakan wawancara dengan responden.

Wawancara tersebut merupakan tanya jawab yang ada hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak.

4. Studi dokumentasi yaitu membaca buku, literatur, karangan ilmiah dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.

Teknik lain yang dipakai adalah study dokumentasi yaitu membaca buku, laporan, karya ilmiah, arsip, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan faktor-faktor

yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

I. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan tesis ini akan digunakan teknik analisis data, dengan menggunakan teknik korelasi Rank Kendal's dan Koefisiensi Konkordansi Kendal's, data yang diperoleh dari masyarakat sebagai responden melalui intrumet kuesioner kemudian diselidiki adanya hubungan yang berpengaruh :

- Kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Kualitas pelayanan terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Motivasi/ dorongan terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Hubungan ketiga faktor tersebut : kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi/ dorongan terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Koefisien korelasi Rank Kendal's.

Rumus untuk membuktikan hubungan antara variabel bebas dengan terikat :

UPT-PUSTAK-UNDIP

$$T = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N (N - 1) - T_x \cdot \frac{1}{2} (N-1) - T_y}}$$

T : Koefisien korelasi rank kendal's antara variabel X dengan variabel Y.

S : Jumlah observasi skor +1 dan -1, untuk semua pasangan.

N : Banyaknya obyek atau individu yang diurutkan pada variabel X dan variabel Y

T_x : $\frac{1}{2} (t-1)$: banyaknya observasi yang berangka sama pada variabel X

T_y : $\frac{1}{2} (t-2)$: banyaknya observasi berangka sama pada variabel Y

Untuk menguji signifikan digunakan rumus Z test seperti di bawah ini :

$$Z = \frac{T}{\frac{2(3N + 5)}{\sqrt{9(N - 1)}}$$

Z : Nilai signifikan

Keterangan :

- Apabila $Z_o > X_t$ taraf signifikan 5% = hipotesa diterima.
- Apabila $Z_o < X_t$ taraf signifikan 5% = hipotesa ditolak

2. Koefisien Konkordansi Kendal's.

Koefisien Konkordansi Kendal's digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel X dan Y adalah sebagai berikut :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2} K^2(N-N) - K \sum T}$$

W : Koefisien Konkordansi Rank Kendal's

S : Jumlah kuadrat deviasi observasi dari mean R_j

K : Banyak himpunan ranking penjenjangan

N : Banyak obyek atau individu yang diberi ranking

Σ : Jumlah nilai T untuk semua ranking

T : Faktor korelasi ranking berangka sama

Untuk menguji signifikan digunakan rumus:

$$X^2 = K (N-1) W$$

X^2 : Chi Square

W : Koefisien Konkordansi Kendal's

Kreteria : -Jika X^2 hitung $\geq X^2$ tabel : hubungan signifikan

-Jika X^2 hitung $< X^2$ tabel : tidak signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Keadaan Umum

Pelaksanaan penelitian dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan telah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

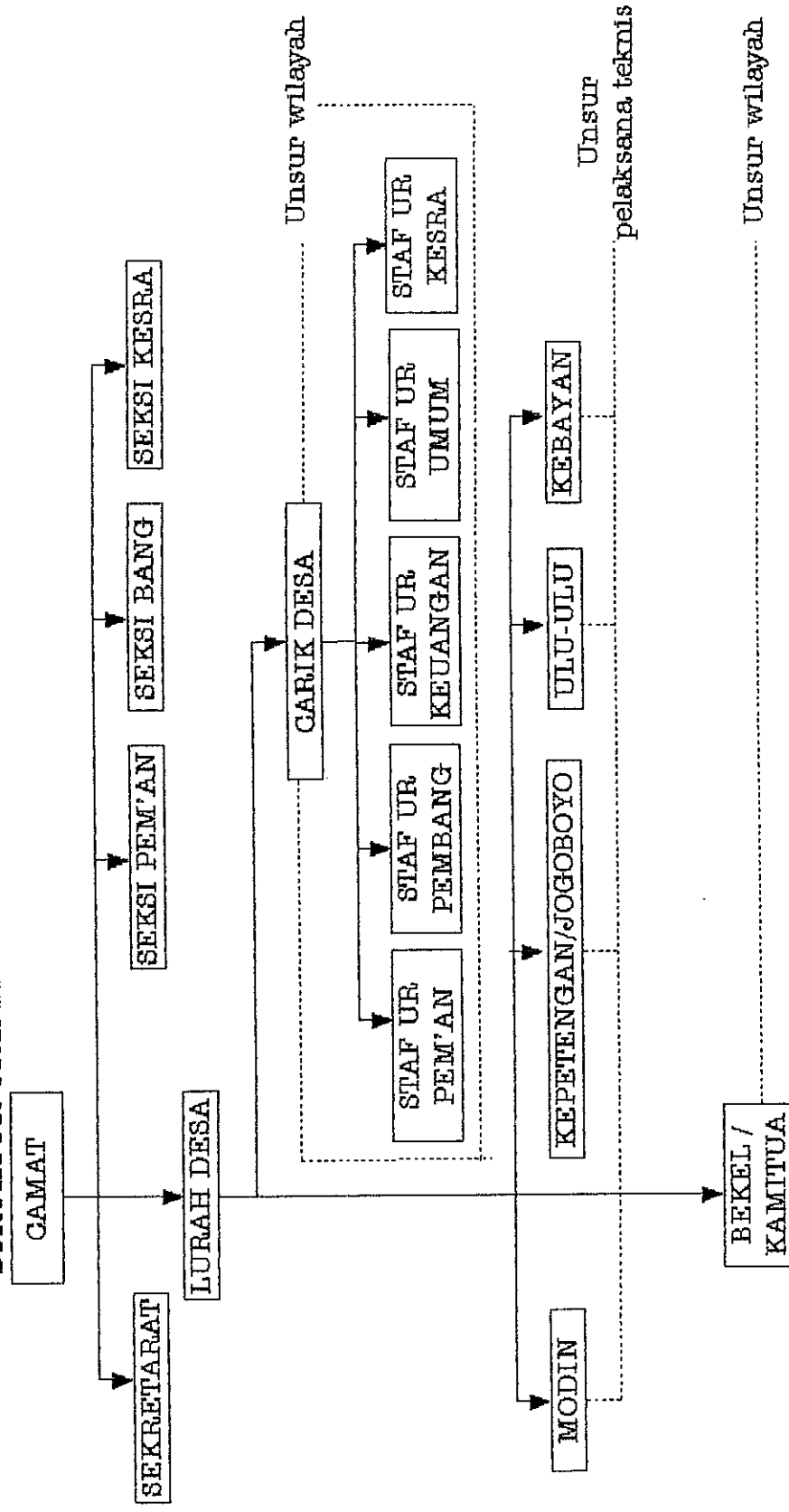
Wilayah Kecamatan Karangtengah memiliki luas 51,54 Km, dibagi menjadi 17 desa adalah :

Sampang, Klitih, Pidodo, Donorejo, Grogol, Ploso, Pulosari, Karangsari, Dukun, Kedunguter, Batu, Wonokerto, Karangtowo, Wonowoso, Rejosari, Wonoagung, Tambakbulusan

Adapun bagan struktur pemerintahan desa di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dapat kita lihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar.4 :

Peraturan Daerah Nomo 8 Tahun 2000
Tanggal 1 Juli 2000
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN DEMAK



Untuk target dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

TABEL IV.1
TARGET PBB KECAMATAN KARANGTENGAH

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	1997	127.727.401,-	127.727.401,-	100
2.	1998	143.712.877,-	143.712.877,-	100
3.	1999	196.936.393,-	156.643.219,-	79,54
4.	2000	190.673.694,-	164.041.953,-	86,03
5.	2001	305.506.259,-	266.894.466,-	87,36

(Sumber Kantor Kecamatan Karangtengah)

Telah diketahui bahwa wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak bukanlah semuanya penduduk Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, namun sebagian besar adalah warga Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Untuk komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Karangtengah sampai dengan akhir bulan Mei 2002 dapat kita dilihat pada tabel yang dibuat sebagai berikut :

TABEL IV.2
KOMPOSISI PENDUDUK KECAMATAN KARANGTENGAH
SAMPAI AKHIR MEI 2002

No	Desa	Laki	Wanita	Jumlah	Prosent
1.	Sampang	1.374	1.299	2.673	4,88
2.	Klitih	1.668	1.812	3.480	6,36
3.	Pidodo	1.552	1.561	3.113	5,69
4.	Donorejo	2.913	2.830	5.743	10,49
5.	Grogol	1.365	1.377	2.742	5,01
6.	Ploso	1.094	1.103	2.197	4,01
7.	Pulosari	1.620	1.587	3.207	5,86
8.	Karangsari	2.405	2.381	4.786	8,74
9.	Dukun	1.837	1.905	3.742	6,84
10.	Kedunguter	1.160	1.203	2.363	4,32
11.	Batu	1.762	1.856	3.618	6,61
12.	Wonokerto	1.363	1.387	2.750	5,02
13.	Wonowoso	1.830	1.900	3.730	6,82
14.	Karangtowo	1.156	1.137	2.293	4,19
15.	Rejosari	1.257	1.279	2.536	4,63
16.	Wonoagung	1.773	1.686	3.459	6,32
17.	Tambakbulusan	1.159	1.139	2.298	4,20
T o t a l		27.288	27.442	54.730	100.00

Sumber : Monografi Kecamatan Karangtengah Mei 2002

Kemudian untuk mengetahui komposisi jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di wilayah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tahun 2002 dapat dilihat pada tabel seperti di bawah ini :

TABEL IV.3
KOMPOSISI KK DAN SPPT KECAMATAN KARANGTENGAH
SAMPAI DENGAN AKHIR MEI 2002

No	Desa	KK	SPPT	Rp
1.	Sampang	710	2.006	17.796.467
2.	Klitih	789	1.291	19.984.972
3.	Pidodo	829	1.164	11.190.448
4.	Donorejo	1.558	1.754	17.775.873
5.	Grogol	672	1.110	9.527.828
6.	Ploso	516	921	5.469.889
7.	Pulosari	749	622	8.504.037
8.	Karangsari	1.206	1.245	11.862.693
9.	Karangtowo	591	761	8.572.342
10.	Dukun	969	1.088	9.985.995
11.	Kedunguter	643	763	8.103.132
12.	Batu	902	1.621	155.087.426
13.	Wonokerto	775	974	28.663.649
14.	Wonowoso	897	982	11.071.277
15.	Rejosari	637	889	8.811.376
16.	Wonoagung	809	1.261	9.443.221
17.	Pambakbulusan	624	536	24.422.066
T o t a l		13.876	18.988	366.273.091

Sumber : Monografi Kecamatan Karangtengah Mei 2002

Sedangkan untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh lurah desa di wilayah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel yang dibuat di bawah ini :

TABEL IV.4
KOMPOSISI TINGKAT PENDIDIKAN LURAH DESA DI
KECAMATAN KARANGTENGAH

No	Desa	Nama Lurah Desa	Pendidikan	Ket
1.	Sampang	WASITO	SMA	
2.	Klitih	KASWOYO	SMP	Ymt
3.	Pidodo	SUMIRAN	MTS	
4.	Donorejo	ANTOKO	MAN	
5.	Grogol	SUBADI	SMA	
6.	Ploso	YAHYA	SMA	
7.	Pulosari	SUMAROH	SMA	
8.	Karangsari	SRI WAHYUNI	SMP	
9.	Karangtowo	ULIYAH	SMP	Ymt
10.	Dukun	SUKONO	SMA	
11.	Kedunguter	SUPRAYITNO	SMA	
12.	Batu	SUKIR	SMP	
13.	Wonokerto	JUMADI	MTS	
14.	Wonowoso	SISWOYO	SMA	
15.	Rejosari	SUPARMIN	MTS	Ymt
16.	Wonoagung	FATUR FAQIH	MTS	
17.	Pambakbuhusan	ABD WAHID	SMA	

Sumber : Kantor Kecamatan Karangtengah Mei 2002

Sedangkan untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh carik desa di wilayah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel yang dibuat di bawah ini :

TABEL IV.5
KOMPOSISI TINGKAT PENDIDIKAN CARIK DESA DI
KECAMATAN KARANGTENGAH

No	Desa	Nama Carik Desa	Pendidikan	Ket
1.	Sampang	SAHRI	SMA	
2.	Klitih	SUTTIYO, BA	SARMUD	
3.	Pidodo	PURWANTO	SMA	
4.	Donorejo	PRAYOGO	SMP	
5.	Grogol	HARSONO, BA	SARMUD	
6.	Ploso	MUSAFAK	SMA	
7.	Pulosari	AFIF	SMP	
8.	Karangsari	PRAYOGO	SMA	
9.	Karangtowo	SUNARTO	SMP	
10.	Dukun	PARTO MULYO	SMP	Ymt
11.	Kedunguter	SUPARMO, BcHk	SARMUD	
12.	Batu	MILKAN	SMA	
13.	Wonokerto	HADI SUCIPTO	SMP	
14.	Wonowoso	SUJARWO	SMA	
15.	Rejosari	MUSYAROFAH	SMP	
16.	Wonoagung	ASRORI	SMP	
17.	Pambakbuhusan	ROCHMAH	SMA	

Sumber : Kantor Kecamatan Karangtengah Mei 2002

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten

Demak berkaitan dengan kepemimpinan, kualitas pelayanan, motivasi dan kesadaran masyarakat, dalam pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan.

Dari variabel kepemimpinan akan dibahas tentang kepemimpinan lurah desa yang bertanggung jawab, melindungi, dan dapat dianut, adalah sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab

Lurah desa bertanggung jawab atas program kerja, program pembangunan dan didukungnya pelaksanaan pembangunan.

1). Lurah desa bertanggung jawab atas program kerja.

Pembahasan lurah desa bertanggung jawab atas program kerja adalah sebagai berikut :

TABEL IV.6

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA LURAH DESA

No	Pelaksanaan program kerja	Frek	%
1.	Banyak yg sudah dilaksanakan	7	9,72
2.	Sebagian sudah dilaksanakan	38	52,78
3.	Sedikit yang dilaksanakan	26	36,11
4.	Tidak ada yang dilaksanakan	1	1,39
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 11

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 1,39% responden yang menyatakan tidak ada yang dilaksanakan, 9,72% responden yang menyatakan banyak yang sudah dilaksanakan, 36,11% responden menyatakan sedikit yang dilaksanakan, 52,78% responden yang menyatakan sebagian sudah dilaksanakan.

Hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa program kerja yang dibuat oleh lurah desa sebagian sudah dilaksanakan.

Sedangkan sejauh mana tingkat keberhasilan program kerja yang dibuat oleh lurah desa dapat dilihat pada tabel yang telah diolah seperti di bawah ini :

TABEL IV.7

KEBERHASILAN PROGRAM KERJA LURAH DESA

No	Keberhasilan program kerja	Frek	%
1.	Sangat berhasil	5	6,94
2.	Cukup berhasil	38	52,78
3.	Kurang berhasil	27	37,50
4.	Tidak berhasil	2	2,78
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 12

Tabel di atas menunjukkan terdapat 2,78% responden menyatakan tidak berhasil, 6,94% responden menyatakan sangat berhasil, 37,5% responden menyatakan kurang berhasil dan 52,78% responden menyatakan cukup berhasil.

Hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lurah desa mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan program kerja yang dibuatnya.

Kemudian untuk mengetahui tanggung jawab lurah desa atas program kerja yang dibuatnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.8
TANGGUNG JAWAB LURAH DESA

No	Tanggung jawab atas prog kerja	Frek	%
1.	Sangat bertanggung jawab	2	2,78
2.	Cukup bertanggung jawab	63	87,50
3.	Kurang bertanggung jawab	7	9,72
4.	Tidak bertanggung jawab		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 13

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 2,78% responden menyatakan sangat bertanggung jawab, 9,72% responden menyatakan kurang

bertanggung jawab, dan 87,50% responden yang menyatakan lurah desa cukup bertanggung jawab.

Hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lurah desa dalam melaksanakan program kerja telah dianggap cukup bertanggung jawab.

- 2). Lurah desa bertanggung jawab atas terlaksananya program pembangunan.

Untuk mengetahui tingkat ketepatan janji dari lurah desa dapat dilihat pada tabel yang dibuat di bawah ini :

TABEL IV.9

JANJI LURAH DESA TENTANG PEMBANGUNAN

No	Janji lurah desa	Frek	%
1.	Selalu menepati	1	1,39
2.	Menepati	44	61,11
3.	Kurang menepati	26	36,11
4.	Tidak pernah menepati	1	1,39
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 14

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada 1,39% responden yang menyatakan tidak menepati, 1,39% responden yang menyatakan sangat menepati, 36,11% responden yang menyatakan

kurang menepati dan 61,11% responden yang menyatakan lurah desa menepati janjinya.

Lurah desa dalam memimpin sering memberi janji untuk melaksanakan pembangunan kepada masyarakat, namun banyak yang menjawab lurah desa menepati janjinya.

Hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lurah desa menepati janjinya, sedangkan lurah desa yang menepati janji adalah lurah desa yang baik.

Setelah membahas tentang janji lurah desa selanjutnya membahas tentang pelaksanaan program, untuk mengetahui pelaksanaan program kerja adalah sebagai berikut :

TABEL IV.10
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

No	Pelaksanaan pembangunan	Frek	%
1.	Berjalan dengan sangat baik.	6	8,33
2.	Berjalan dengan baik.	64	88,89
3.	Banyak yang tidak berjalan.	2	2,78
4.	Tidak berjalan sama sekali.		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 15

Hal di atas menunjukkan 2,78% responden menyatakan banyak yang tidak berjalan, 8,33% responden menyatakan berjalan dengan sangat baik, 88,89% responden menyatakan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik.

Hal tersebut disimpulkan bahwa masyarakat di desa mengakui adanya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh lurah desa.

- 3). Lurah desa bertanggung jawab atas didukungnya pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat dukungan masyarakat dalam pembangunan di desa yang dipimpin oleh lurah desa, dapat dilihat pada tabel yang dibuat di bawah ini :

TABEL IV.11
DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

No	Dukungan progri pembangunan	Frek	%
1.	Selalu mendukung	27	37,50
2.	Mendukung	36	50,00
3.	Kurang mendukung	9	12,50
4.	Tidak perlu didukung		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 16

Tabel di atas menunjukkan terdapat 12,5% responden menyatakan kurang mendukung, 37,5% responden yang menyatakan selalu mendukung, dan 50,00% responden menyatakan mendukung.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa lurah desa dalam melaksanakan program pembangunan didukung oleh banyak masyarakat.

b. Lurah desa dapat melindungi masyarakat sehingga terjadi rasa aman dan memecahkan masalah masyarakat

1). Terciptanya rasa aman sehingga lurah desa diakui sebagai pelindung masyarakat.

Untuk mengetahui sejauhmana masyarakat merasakan aman, adalah sebagai berikut :

TABEL IV.12
TERJADI RASA AMAN

No	Terjadi rasa aman	Frek	%
1.	Sangat aman		
2.	Aman	72	100,00
3.	Sering merasa tidak aman		
4.	Tidak pernah merasa aman		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 17

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 72 responden (100,00%) menyatakan aman.

Masyarakat dapat merasa aman untuk hidup di desa, hal ini disimpulkan bahwa lurah desa dianggap dapat melindungi masyarakatnya.

- 2). Ikut memecahkan masalah sehingga lurah desa diakui sebagai pelindung masyarakat.

Didalam kehidupan sering timbul berbagai macam masalah yang membutuhkan keikutsertaan lurah desa. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keikutsertaan lurah desa dalam memecahkan masalah, adalah sebagai berikut :

TABEL IV.13

IKUT MEMECAHKAN MASALAH MASYARAKAT

No	Ikutserta memecahkan masalah	Frek	%
1.	Sangat membantu	2	2,78
2.	Membantu	66	91,67
3.	Kurang membantu	4	5,56
4.	Tidak pernah membantu		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 18

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 2,78% responden menyatakan sangat membantu,

5,56% responden menyatakan kurang membantu, dan 91,67% responden menyatakan membantu memecahkan masalah yang dialami masyarakat.

tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jika masyarakat mendapat kesulitan lurah desa ikut membantu memecahkan permasalahan.

c. Lurah desa dapat dijadikan panutan oleh masyarakat.

1). Rasa segan terhadap kepemimpinan lurah desa.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat rasa segan masyarakat terhadap kepemimpinan lurah desa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.14

RASA SEGAN MASYARAKAT

No	Segan terhadap lurah desa	Frek	%
1.	Selalu disegani	21	29,17
2.	Cukup disegani	44	61,11
3.	Kurang disegani	5	6,94
4.	Tidak disegani	2	2,78
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 19

Tabel tersebut di atas menunjukkan ada 2,78% responden yang menyatakan tidak disegani, 6,94% responden yang menyatakan kurang

disegani, 29,17% responden yang menyatakan sangat disegani, dan 61,11% responden yang menyatakan cukup disegani.

Hal tersebut menunjukkan lurah desa cukup disegani masyarakat.

2). Perilaku lurah desa dapat dijadikan panutan.

Perilaku lurah desa diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dan dapat dijadikan panutan. Untuk mengetahui perilaku lurah desa, dapat dilihat pada tabel yang dibuat di bawah ini :

TABEL IV.15

PERILAKU LURAH DESA DIJADIKAN PANUTAN

No	Perilaku lurah sebagai panutan	Frek	%
1.	Sangat dapat dijadikan panutan	1	1,39
2.	Dapat dijadikan panutan	71	98,61
3.	Kurang dapat dijadikan panutan		
4.	Tidak dapat dijadikan panutan		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 20

Tabel di atas menunjukkan terdapat 1,39% responden menyatakan sangat dapat dijadikan panutan dan 98,61% responden menyatakan perilaku lurah desa dapat dijadikan panutan.

Dari permasalahan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lurah desa dalam memimpin dapat dijadikan panutan oleh masyarakat.

- 3). Percaya terhadap lurah desa sehingga dapat dianut.

Untuk mengetahui tingkat kejujuran lurah desa, dapat dilihat pada tabel yang diolah dari pertanyaan nomor 21, 22, 23 sebagai berikut :

TABEL IV.16
KEJUJURAN LURAH DESA

No	Kejujuran lurah desa	Frek	%
1.	Sangat jujur		
2.	Jujur	70	97,22
3.	Kurang jujur	2	2,78
4.	Tidak jujur		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 21

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 2,78% responden yang menyatakan kurang jujur dan 97,22% responden yang menyatakan jujur.

Hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kejujuran lurah desa yang telah diakui oleh masyarakat, dari kesimpulan ini akan

memudahkan lurah desa dalam melaksanakan tugasnya.

Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa yang dipimpin oleh lurah desa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.17
PERCAYA KEPADA APARAT YANG DIPIMPIN OLEH
LURAH DESA

No	Percaya kepada aparat desa	Frek	%
1.	Sangat percaya		
2.	Aparat dapat dipercaya	66	91,67
3.	Kurang percaya	6	8,33
4.	Tidak percaya		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 22

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 8,33% responden yang menyatakan kurang percaya dan 91,67% responden menyatakan aparat yang dipimpin oleh lurah desa dapat dipercaya.

Penyataan tersebut di atas, yaitu aparat desa dapat dipercaya oleh masyarakat, hal ini

merupakan salah satu bukti bahwa kepemimpinan lurah desa dapat dianut.

Setelah mengetahui masyarakat percaya kepada aparat yang dipimpin oleh lurah desa, perlu kita ketahui tingkat percaya kepada lurah desa, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.18
PERCAYA KEPADA LURAH DESA

No	Percaya kepada lurah desa	Frek	%
1.	Sangat percaya		
2.	Lurah desa dapat dipercaya	70	97,22
3.	Kurang percaya	2	2,78
4.	Tidak percaya		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 23

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 2,78% responden menyatakan kurang percaya dan 97,22% responden menyatakan lurah desa dapat dipercaya.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan lurah desa termasuk orang yang dapat dipercaya.

- 4). Kepemimpinan lurah desa menjadi dorong untuk membayar PBB.

Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepemimpinan lurah desa sehingga menjadikan dorongan bagi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dilihat pada tabel yang dibuat di bawah ini :

TABEL IV.19
KEPEMIMPINAN MENJADI DORONGAN

No	Dorongan untuk membayar PBB	Frek	%
1.	Sangat terdorong	14	19,44
2.	Bisa terdorong	53	73,61
3.	Kurang terdorong	4	5,56
4.	Tidak terdorong	1	1,39
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 24

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 1,39% responden menyatakan tidak terdorong, 5,56% responden menyatakan kurang terdorong, 19,44% responden yang menyatakan sangat terdorong, dan 73,61% responden menyatakan bisa terdorong.

Dari pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lurah desa dapat mendorong masyarakat.

2. Kualitas pelayanan.

a. Kesederhanaan dan ketepatan waktu.

1). Kemudahan pelayanan.

Untuk mengetahui tingkat kemudahan pelayanan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.20
KEMUDAHAN LURAH DESA DLM PELAYANAN

No	Mudah dlm memberi layanan	Frek	%
1.	Sangat mudah	16	22,22
2.	Mudah	56	77,78
3.	Sulit		
4.	Sangat sulit		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 25

Tabel di atas menunjukkan ada 22,22% responden menyatakan sangat mudah dan 77,78% responden menyatakan pelayanan di desa mudah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan dari pemerintah desa kepada masyarakat berlangsung dengan mudah.

2). Kelancaran pelayanan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kelancaran pelayanan yang diselenggarakan

pemerintahan di desa kepada masyarakat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.21
KELANCARAN PELAYANAN DARI LURAH DESA

No	Kelacaran pelayanan	Frek	%
1.	Sangat lancar	2	2,78
2.	Cukup lancar	68	94,44
3.	Kurang lancar	2	2,78
4.	Tidak lancar		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 26

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada 2,78% responden yang menyatakan kurang lancar, 2,78% responden yang menyatakan sangat lancar dan 94,44% responden yang menyatakan cukup lancar.

Dengan adanya penilaian cukup lancar sistem pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa, akan memperlancar pula pelaksanaan birokrasi yang ada di pemerintahan desa tersebut.

3). Ketepatan pelayanan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketepatan janji pelayanan yang diselenggarakan

oleh pemerintah desa, dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini :

TABEL IV.22
KETEPATAN JANJI PELAYANAN DARI LURAH DESA

No	Ketepatan janji pelayanan	Frek	%
1.	Sangat tepat	4	5,56
2.	Tepat	67	93,06
3.	Sering tidak tepat	1	1,39
4.	Tidak pernah tepat		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 27

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 1,39% responden yang menyatakan sering tidak tepat, 5,56% responden yang menyatakan sangat tepat dan 93,06% responden menyatakan penyelenggaraan pelayanan tepat janjinya.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa janji pelayanan dari lurah desa dinilai cukup tepat.

b. Kejelasan, kepastian dan keterbukaan.

1). Prosedur pelayanan

Untuk mengetahui sejauh mana prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.23
PROSEDUR PELAYANAN DARI APARAT
PEMERINTAH DESA

No	Prosedur pelayanan dari aparat	Frek	%
1.	Sangat dapat diterima	3	4,17
2.	Cukup dapat diterima	68	94,44
3.	Kurang dapat diterima	1	1,39
4.	Tidak dapat diterima		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 28

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 1,39% responden menyatakan kurang dapat diterima, 4,17% responden yang menyatakan sangat dapat diterima, dan 94,44% responden yang menyatakan prosedur pelayanan cukup dapat diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan tidak sulit, sehingga masyarakat menerima prosedur yang ditentukan.

2). Persyaratan pelayanan

Kemudian untuk mengetahui tingkat kemudahan persyaratan pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah desa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.24
KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN

No	Kemudahan syarat pelayanan	Frek	%
1.	Selalu sangat mudah dicukupi	67	93,06
2.	Dapat dicukupi	5	6,94
3.	Sering sulit dicukupi		
4.	Tidak dapat dicukupi		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 29

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 6,94% responden yang menyatakan dapat dicukupi dan 93,06% responden yang menyatakan persyaratan pelayanan selalu sangat mudah dicukupi oleh masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat menerima persyaratan yang harus dicukupi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan desa.

3). Keterbukaan pelayanan

Keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan sangatlah penting,
Untuk mengetahui tingkat keterbukaan prosedur pelayanan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.25
KETERBUKAAN PROSEDUR PELAYANAN

No	Keterbukaan pelayanan	Frek	%
1.	Sangat terbuka	61	84,72
2.	Cukup terbuka	11	15,28
3.	Kurang terbuka		
4.	Tidak terbuka		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 30

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 15,28% responden yang menyatakan cukup terbuka dan 84,72% responden yang menyatakan sangat terbuka.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah dapat menerima keterbukaan prosedur atau persyaratan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

c. Keamanan dan keadilan.

1). Kepastian hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan aturan yang berlaku, dapat dilihat pada tabel yang telah dibuat seperti di bawah ini :

TABEL IV.26
KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN ATURAN

No	Kesesuaian pelayanan dg aturan	Frek	%
1.	Sangat sesuai dengan aturan		
2.	Sesuai dengan aturan	72	100,00
3.	Kurang sesuai dengan aturan		
4.	Tidak sesuai dengan aturan		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 31

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 100,00% responden yang menyatakan pelayanan didesa sesuai dengan aturan.

Hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan aturan.

2). Perlakuan yang sama

Pelayanan publik harus diselenggarakan secara merata tanpa pandang bulu, sehingga setiap lapisan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sama.

Untuk mengetahui tingkat pemerataan mendapat pelayanan kepada setiap masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL IV.27
PELAYANAN BAGI SEMUA LAPISAN MASY

No	Setiap masy mendapat layanan	Frek	%
1.	Setiap masyarakat dng mudah	72	100,00
2.	Kadang-kadang ada yg dipersulit		
3.	Banyak yang dipersulit		
4.	Selalu sulit pendapat pelayanan		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 32

Tabel di atas menunjukkan ada 100,00% responden menyatakan setiap masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan di pemerintahan desa sudah sesuai dengan sistem pelayanan yang adil, merata dan tanpa pandang bulu, sehingga semua masyarakat mempunyai hak yang sama.

3). Kenyamanan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang nyaman sangat diperlukan.

Untuk mengetahui sejauh mana kenyamanan terhadap pelaksanaan pelayanan didesa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.28
 RASA NYAMAN THDP PENYELENGG PELAYANAN

No	Perasaan nyaman	Frek	%
1.	Sangat nyaman		
2.	Cukup nyaman	72	100,00
3.	Kurang nyaman		
4.	Tidak nyaman		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 33

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 100,00% responden menyatakan cukup nyaman.

Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan yang diharapkan sudah dapat oleh penyelenggara layanan (pemerintah desa).

d. Efisiensi dan ekonomis.

1). Kecepatan pelayanan.

Masyarakat sebagai konsumen dalam pelayanan publik selalu mengharap agar mendapatkan pelayanan yang cepat.

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian waktu pelayanan dengan harapan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.29
KESESUAIAN WAKTU PELAYANAN DENGAN
HARAPAN

No	Wkt pelayan sesuai dg harapan	Frek	%
1.	Sangat sesuai dengan harapan	5	6,94
2.	Cukup sesuai	66	91,67
3.	Kurang sesuai	1	1,39
4.	Tidak sesuai		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 34

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 1,39% responden yang menyatakan kurang sesuai, 6,94% responden yang menyatakan sangat sesuai dengan harapan, dan 91,67% responden yang menyatakan waktu/lama pelaksanaan pelayanan cukup sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa waktu penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah desa dinilai relatif cepat/tidak lama sehingga pelayanan cukup lancar.

2). Biaya pelayanan.

Untuk mengetahui apakah biaya pelayanan dianggap wajar, adalah sebagai berikut :

TABEL IV.30
KEWAJARAN BIAYA PELAYANAN

No	Biaya pelayanan	Frek	%
1.	Sangat murah shg sangat wajar	1	1,39
2.	Wajar dan umum	71	98,61
3.	Agak mahal		
4.	Sangat mahal		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 35

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 1,39% responden yang menyatakan sangat murah sehingga sangat wajar dan 98,61% responden menyatakan biaya pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah desa dinilai wajar dan umum.

Hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pelayanan khususnya jika membutuhkan biaya dinilai oleh masyarakat wajar dan umum.

3). Pencapaian sasaran.

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian pelaksanaan pelayanan di desa dengan sasaran yang dituju, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.31
KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN SASARAN

No	Kesesuaian pelayan dg sasaran	Frek	%
1.	Sangat sesuai	2	2,78
2.	Cukup sesuai	70	97,22
3.	Kurang sesuai		
4.	Tidak sesuai		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 36

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 2,78% responden yang menyatakan sangat sesuai dan 97,22% responden yang menyatakan cukup sesuai.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan sudah cukup sesuai dengan maksud, keinginan dan tujuan masyarakat.

3. Motivasi.

Pembahasan variabel ini adalah sebagai berikut :

a. Dapat tergerak.

1). Berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan apakah sudah

sesuai dengan harapan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.32
PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN HARAPAN
MASYARAKAT

No	Pembangun sesuai dg keinginan	Frek	%
1.	Sangat sesuai	4	5,56
2.	Cukup sesuai	35	48,61
3.	Kurang sesuai	32	44,44
4.	Tidak sesuai	1	1,39
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 37

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 1,39% responden menyatakan tidak sesuai, 5,56% responden menyatakan sangat sesuai, 44,44% responden yang menyatakan kurang sesuai dan 48,61% responden yang menyatakan pelaksanaan pembangunan cukup sesuai dengan harapan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai respon positif terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat manfaat pembangunan sehingga dapat dirasakan

oleh masyarakat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.33
PEMBANGUNAN DAPAT DIRASAKAN OLEH
MASYARAKAT

No	Merasakan manfaat pembang	Frek	%
1.	Sangat dapat	18	25,00
2.	Dapat	47	65,28
3.	Kurang dapat	7	9,72
4.	Tidak dapat		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 38

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 9,72% responden yang menyatakan kurang dapat, 25% responden yang menyatakan sangat dapat dan 65,28% responden yang menyatakan dapat merasakan manfaat pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Melihat jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah dapat merasakan manfaat dari pembangunan.

Untuk mengetahui tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.34
MASYARAKAT IKUT BERPARTISIPASI DALAM
PEMBANGUNAN

No	Ikut berpartisipasi dlm pembang	Frek	%
1.	Selalu ikut berpartisipasi	10	13,89
2.	Kadang-kadang ikut berpartisipa	56	77,78
3.	Malas ikut berpartisipasi	4	5,56
4.	Tidak pernah ikut berpartisipasi	2	2,78
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 39

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 2,78% responden yang menyatakan tidak pernah ikut, 5,56% responden yang menyatakan malas ikut berpartisipasi, 13,89% responden yang menyatakan selalu ikut dan 77,78% responden yang menyatakan kadang-kadang ikut berpartisipasi.

Melihat jawaban dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

2). Melaksanakan arahan lurah desa.

Untuk mengetahui seberapa banyak frekuensi pelaksanaan pengarahannya dari lurah desa

kepada masyarakat, dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.35
FREKUENSI LURAH DS MEMBERI PENGARAHAN

No	Lur ds sering memberi arahan	Frek	%
1.	Sering sekali		
2.	Kadang-kadang	26	36,11
3.	Kurang	45	62,50
4.	Tidak pernah	1	1,39
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 40

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 1,39% responden yang menyatakan tidak pernah, 36,11% responden yang menyatakan kadang-kadang, dan 62,50% responden yang menyatakan tingkat frekuensi pemberian pengarahan dari lurah desa kepada masyarakat masih kurang.

Pada tabel ini dapat disimpulkan bahwa frekuensi pengarahan dari lurah desa kepada masyarakat Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak masih kurang.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengarahan dari lurah desa kepada

masyarakat, dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

TABEL IV.36
PENERIMAAN PENGARAHAN LURAH DESA
KEPADA MASYARAKAT

No	Penerimaan pengarahan	Frek	%
1.	Dengan mudah dapat diterima	2	2,78
2.	Walau sulit masih dpt diterima	65	90,28
3.	Sulit, hanya kadang dpt diterima	5	6,94
4.	Pengarah slt & td dpt diterima		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 41

Tabel tersebut menunjukkan ada 2,78% responden menyatakan dengan mudah dapat diterima, 6,94% responden menyatakan sulit hanya kadang dapat diterima, 90,28% responden menyatakan walaupun sulit masih dapat diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dapat menerima pengarahan yang diberikan lurah desa.

b. Terpenuhi kebutuhan.

1). Terjalin hubungan harmonis dengan pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan kemasyarakatan antara warga dengan aparat desa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.37
HUBUNGAN KEMASYARAKATAN ANTARA WARGA
DENGAN APARAT

No	Hubungan masyarakat dg aparat	Frek	%
1.	Sangat harmonis	27	37,50
2.	Biasa saja	45	62,50
3.	Kurang harmonis		
4.	Tidak harmonis		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 42

Tabel di atas menunjukkan ada 37,50% responden yang menyatakan sangat harmonis dan 62,50% responden menyatakan biasa saja.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masyarakat dengan aparat pemerintah berlangsung harmonis.

2). Terjalin hubungan harmonis dengan tetangga.

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan kemasyarakatan antara warga yang satu dengan warga yang lain, seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.38
HUBUNGAN KEMASYARAKATAN ANTARA
RESPONDEN DENGAN TETANGGA

No	Hubungan kemasy responden	Frek	%
1.	Sangat harmonis	29	40,28
2.	Biasa saja	43	59,72
3.	Kurang harmonis		
4.	Tidak harmonis		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 43

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada 40,28% responden yang menyatakan sangat harmonis, dan 59,72% responden yang menyatakan hubungannya dengan masyarakat biasa saja.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan pergaulan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dapat berlangsung dengan harmonis.

4. Tingkat kesadaran masyarakat.

Pembahasan variabel tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah sebagai berikut :

a. Pengetahuan.

- 1). Tahu akan pembangunan.

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang pembangunan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.39
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ARTI
PENTINGNYA PEMBANGUNAN

No	Pengertian akan pembangunan	Frek	%
1.	Sangat mengerti	31	43,06
2.	Cukup mengerti	34	47,22
3.	Kurang mengerti	7	9,72
4.	Tidak mengerti		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 44

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 9,72% responden yang menyatakan kurang mengerti, 43,06% responden yang menyatakan sangat mengerti dan 47,22% responden yang menyatakan cukup mengerti tentang pembangunan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat cukup mengerti dan tahu akan arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Kemudian untuk mengetahui dari mana masyarakat tahu tentang pembangunan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.40
SUMBER PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
PEMBANGUNAN

No	Sumber pemahaman pembang	Frek	%
1.	Dari teman/tetangga	70	97,22
2.	Dari pengarahan lurah desa	2	2,78
3.	Dari media masa/sekolah		
4.	Tidak tahu		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 45

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 2,78% responden yang menyatakan dari pengarahan lurah desa dan 97,22% responden yang menyatakan dari teman/tetangga.

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa informasi yang diperoleh tentang pemahaman Pajak Bumi dan Bangunan dari teman/tetangga sehingga peran tetangga sangat penting.

2). Tahu akan pentingnya PBB.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengertian masyarakat tentang arti pentingnya

Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.41
PENGERTIAAN AKAN KEPENTINGAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN

No	Pengertian pentingnya PBB	Frek	%
1.	Sangat penting	34	47,22
2.	Biasa saja	36	50,00
3.	Kurang penting	2	2,78
4.	Tidak ada yang penting		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 46

Tabel di atas menunjukkan terdapat 2,78% responden menyatakan kurang penting, 47,22% responden menyatakan sangat penting dan 50,00% responden menyatakan biasa saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah banyak yang mengerti akan arti dan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat di Kecamatan Karangtengah dapat merasakan manfaat dari hasil penarikan Pajak

Bumi dan Bangunan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.42
MERASAKAN MANFAAT DARI HASIL
PENARIKAN PBB

No	Merasakan manfaat PBB	Frek	%
1.	Sangat dapat dirasakan	13	18,06
2.	Cukup dapat dirasakan	2	2,78
3.	Kurang dapat dirasakan	57	79,17
4.	Tidak dapat dirasakan		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 47

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 2,78% responden yang menyatakan cukup dapat dirasakan, 18,06% responden yang menyatakan sangat dapat dirasakan dan 79,17% responden yang menyatakan kurang dapat dirasakan manfaat dari hasil penarikan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Karangtengah kurang dapat merasakan hasil dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan secara langsung, sehingga lurah desa perlu sering memberikan pengarahan tentang

manfaat dari hasil penarikan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Sikap dan perilaku.

Pembahasan indikator ini adalah sebagai berikut :

1). Membantu pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat kesanggupan masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan cepat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.43
KESEDIAAN MEMBANTU KELANCARAN TUGAS
(MEMBAYAR PBB DENGAN CEPAT)

No	Kesediaan membantu	Frek	%
1.	Sangat bersedia membantu	4	5,56
2.	Bersedia membantu	68	94,44
3.	Dg terpaksa bersedia membantu		
4.	Tidak bersedia membantu		
J u m l a h		72	100,00

Dilolah dari pertanyaan nomor 48

Daro tabel di atas ada 5,56% responden menyatakan sangat bersedia membantu, 94,44% responden menyatakan bersedia membantu.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan

Karangtengah Kabupaten Demak bersedia membantu sebagian dari tugas lurah desa, dan mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2). Melaksanakan pembayaran PBB.

Untuk mengetahui tingkat kerelaan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dilihat pada tabel yang diolah dibawah ini :

TABEL IV.44
KERELAAN MEMBAYAR PBB

No	Kerelaan membayar PBB	Frek	%
1.	Dengan suka rela	72	100,00
2.	Ada sedikit rasa terpaksa		
3.	Dengan penuh rasa terpaksa		
4.	Tidak bersedia		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 49

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 100,00% (seluruh) responden yang menyatakan dengan suka rela untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Karangtengah Kabupaten

Demak dengan suka rela akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat kesediaan masyarakat Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak agar segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV.45
BERSEDIA SEGERA MEMBAYAR PBB

No	Kesediaan membayar PBB	Frek	%
1.	Segera membayar	72	100,00
2.	Dibayar jika jatuh tempo		
3.	Dibayar jika sudah kedaluwarso		
4.	Tidak mau membayar		
J u m l a h		72	100,00

Diolah dari pertanyaan nomor 50

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 100,00% (seluruh) 72 responden menyatakan kesediaannya untuk segera membayar PBB.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah sadar untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dengan segera akan membayarnya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Variabel Penelitian.

Hasil diskripsi yang telah disajikan sesuai dengan data dari masing-masing pertanyaan yang telah dijawab oleh responden sehingga memberikan gambaran secara menyeluruh tentang variabel yang telah diteliti.

Kemudian untuk melaksanakan uji hipotesis diperlukan skor masing-masing responden yang diteliti. Kategori yang digunakan adalah sangat baik, baik, cukup, dan tidak baik. Guna menyusun kategori maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{R}{K}$$

I = intrval

R = skor tertinggi - skor terendah

K = jumlah kelas

a. Kepemimpinan.

Berdasarkan dari pertanyaan yang telah dijawab oleh responden, maka dibuat hasil keseluruhan sebagai satu kesatuan dari variabel kepemimpinan lurah desa.

Tabel di bawah ini merupakan kategori dari jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada responden, dari variabel kepemimpinan lurah desa yaitu pertanyaan nomor 11 sampai dengan pertanyaan nomor 24. Hasil penilaian tersebut diukur melalui 14 pertanyaan, apabila nilai ini disebar pada 4 kategori maka hasilnya adalah sebagai berikut :

TABEL IV.46
KATEGORISASI VARIABEL KEPEMIMPINAN

Keterangan	Frek	%
Sangat baik (37 – 38)	5	6,94
Baik (39 – 40)	29	40,28
Cukup baik (41 – 42)	30	41,67
Tidak baik (lebih dari 42)	8	11,11
J u m l a h	72	100,00

Tabel di atas menunjukkan kepemimpinan lurah desa penilaian sangat baik 6,94% dan baik 40,28%, sehingga kategori baik adalah 47,22%. Untuk penilaian cukup baik 41,67% dan tidak baik 11,11% sehingga kategori kurang baik adalah 52,78%.

Kurangnya penilaian pada variabel kepemimpinan ini dikarenakan masih kurangnya

Sumber Daya Manusia yang menangani masalah Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah.

b. Kualitas pelayanan.

Tabel di bawah ini merupakan kategori dari jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada responden, dari variabel kualitas pelayanan lurah desa yaitu pertanyaan nomor 25 sampai dengan pertanyaan nomor 36. Hasil penilaiannya diukur melalui 12 pertanyaan dan apabila nilai tersebut di atas disebar pada 4 kategori maka hasil sebaran tersebut, adalah sebagai berikut :

TABEL IV.47

KATEGORISASI VARIABEL KUALITAS PELAYANAN

Keterangan	Frek	%
Sangat baik (37)	1	1,39
Baik (38)	24	33,33
Cukup baik (39)	34	47,22
Tidak baik (40)	13	18,06
J u m l a h	72	100,00

Tabel di atas menunjukkan penilaian sangat baik 1,39% dan baik 33,33%, sehingga kategori baik adalah 34,72%.

Untuk penilaian cukup baik 47,22% dan tidak baik 18,06% sehingga kategori kurang baik adalah 65,28%.

c. Motivasi.

Sedangkan untuk mengetahui kategori dari hasil penilaian atas jawaban responden pada variabel motivasi (pertanyaan nomor 37 sampai dengan pertanyaan nomor 43) yang diukur melalui 7 pertanyaan dan telah dijawab oleh responden dan apabila nilai ini disebar pada 4 kategori maka hasilnya akan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.48
KATEGORISASI VARIABEL MOTIVASI

Keterangan	Frek	%
Sangat baik (23 - 24)	9	12,50
Baik (21 - 22)	33	45,83
Cukup baik (19 - 20)	25	34,72
Tidak baik (17 - 18)	5	6,95
J u m l a h	72	100,00

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penilaian motivasi yang sangat baik adalah 12,50% dan baik adalah 45,83%, sehingga kategori baik adalah 58,33%.

Untuk penilaian cukup baik 34,72% dan tidak baik 6,95% sehingga kategori kurang baik adalah 41,67%.

d. Kesadaran masyarakat.

Kemudian untuk mengamati penilaian jawaban responden dari variabel kesadaran masyarakat (pertanyaan nomor 44 sampai dengan pertanyaan nomor 50) kemudian diukur melalui 7 pertanyaan dan apabila nilai ini disebar pada 4 kategori maka hasilnya dapat dilihat seperti di bawah ini :

TABEL IV.49
KATEGORISASI VARIABEL KESADARAN
MASYARAKAT

Keterangan	Frek	%
Sangat baik (lebih dr 26)	1	1,39
Baik (25 - 26)	25	34,72
Cukup baik (23 - 24)	43	59,72
Tidak baik (kurang dr 23)	3	4,17
J u m l a h	72	100,00

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa penilaian kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sangat baik 1,39% dan baik 34,72%, sehingga kategori baik adalah 36,11%.

Untuk penilaian cukup baik 59,72% dan tidak baik 4,17% sehingga kategori kurang baik adalah 63,89%.

2. Uji Hipotesis.

a. Hubungan Kepemimpinan dengan Kesadaran masyarakat

Hubungan antara kepemimpinan dengan kesadaran masyarakat, setelah diolah dengan tabel silang, hasilnya adalah sebagai berikut :

TABEL 50
HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN DENGAN
KESADARAN MASYARAKAT

		X	Kepemimpinan		Total
			2 Ckp baik	3 Baik	
Y Kesadaran masyarakat	2 Cukup Baik			57 81.4%	57 79.2%
	3 Baik		1 50.0%	1 1.4%	2 2.8%
	4 Sangat baik		1 50.0%	12 17.1%	13 18.1%
Total			2 100.0%	70 100.0%	72 100.0%

V23*V47 Crosstabulation

Hasil uji statistik hubungan antara variabel kepemimpinan dengan variabel kesadaran masyarakat menunjukkan koefisien rank kendal sebesar 0,293. Guna menguji kebenaran antara kedua variabel, dilakukan uji T dengan koefisien sebesar 1,451, T tabel

dengan tingkat kebenaran 95%, harga tabel adalah 0,050. Hal ini dapat disimpulkan bahwa harga hitung lebih besar dari harga tabel ($1.451 > 0,050$) artinya ada hubungan antara kepemimpinan dengan kesadaran. Apabila dilihat dari signifikan diperoleh hasil 0,147 sehingga H_0 ditolak artinya ada hubungan positif.

b. Hubungan Kualitas pelayanan dengan Kesadaran masyarakat

Untuk melihat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kesadaran masyarakat, hasilnya adalah sebagai berikut :

TABEL 51
HUBUNGAN ANTARA KUALITAS PELAYANAN DENGAN
KESADARAN MASYARAKAT

Y		X	Kualitas pelayanan		Total
			3 Ckp baik	4 Sang baik	
Kesadaran masyarakat	2 Cukup Baik	55 78.6%	2 100.0%	57 79.2%	
	3 Baik	2 2.9%		2 2.8%	
	4 Sangat baik	13 18.6%		13 18.1%	
	Total	70 100.0%	2 100.0%	72 100.0%	

V36*V47 Crosstabulation

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel menunjukkan koefisien rank

kendal sebesar 0,85. Untuk menguji kebenaran antara kedua variabel dilakukan uji T dengan koefisien sebesar 1,399, apabila T tabel dengan tingkat kebenaran 95% maka harga tabel adalah 0,050. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa harga hitung lebih besar dari harga tabel ($1.399 > 0,050$) artinya ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kesadaran masyarakat. Signifikannya adalah 0,162 sehingga H_0 ditolak artinya ada hubungan positif.

c. Hubungan Motivasi dengan Kesadaran masyarakat

Untuk mengetahui hubungan antara motivasi dengan kesadaran masyarakat, seperti di bawah ini :

TABEL 52
HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DENGAN
KESADARAN MASYARAKAT

X		Kualitas pelayanan				Total
		1 Tdk Baik	2 Cukp Baik	3 Baik	4 Sangt baik	
Y	2 Ckp baik	1 100.0%	22 68.8%	31 88.6%	3 75.0%	57 79.2%
	3 Baik		1 3.1%	1 2.9%		2 2.8%
	4 Sgt baik		9 28.1%	3 8.6%	1 25.0%	13 18.1%
	Total	1 100.0%	32 100.0%	35 100.0%	4 100.0%	72 100.0%

V37*V47Crosstabulation

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil uji statistik hubungan antara variabel motivasi dengan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak menunjukkan bahwa koefisien rank kendal adalah sebesar 0,176. Guna menguji kebenaran antara kedua variabel tersebut dilakukan uji T dengan koefisien sebesar 1,512, apabila T tabel dengan tingkat kebenaran 95 persen maka harga tabel adalah 0,050. Sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa harga hitung lebih besar dari harga tabel ($1.512 > 0,050$) artinya ada hubungan antara motivasi dengan kesadaran masyarakat. Apabila dilihat dari signifikan diperoleh hasil 0,131 sehingga H_0 ditolak artinya ada hubungan positif.

d. Hubungan Kepemimpinan, Kualitas pelayanan dan Motivasi dengan Kesadaran masyarakat

Untuk melihat hubungan antara variabel kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi dengan variabel kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, setelah diuji dengan menggunakan uji statistik konkordansi

kendal's, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 53
PERHITUNGAN MENGGUNAKAN RUMUS KENDAL'S

KEPEMIMPINAN dg KESADARAN MASYARAKAT			KEPE MIMP	Kesad masy
Kendal's's tau_b	KEPE MIMP	Correlation Coefficient	1.000	.028
		Sig. (2-tailed)	.	.772
		N	72	72
	Kesad. masy	Correlation Coefficient	.028	1.000
		Sig. (2-tailed)	.772	.
		N	72	72

KUALITAS PELAYANAN dg KESADARAN MASYARAKAT			KUAL. P	Kesad masy.
Kendal's's tau_b	KUAL. P	Correlation Coefficient	1.000	.078
		Sig. (2-tailed)	.	.455
		N	72	72
	Kesad masy	Correlation Coefficient	.078	1.000
		Sig. (2-tailed)	.455	.
		N	72	72

MOTIVASI dg KESADARAN MASYARAKAT			MOTIV ASI	Kesad masy.
Kendal's's tau_b	MOTI VASI	Correlation Coefficient	1.000	.217
		Sig. (2-tailed)	.	.077
		N	72	72
	Kesad masy	Correlation Coefficient	.217	1.000
		Sig. (2-tailed)	.077	.
		N	72	72

TEST STATISTICS

TEST	KEPEM IMP	KUAL. P	MOTIV ASI	Kesad. Masy
Chi-Square(a,b,c,d)	21.722	31.444	47.111	38.972
Df	6	3	7	4
Asymp. Sig.	.001	.000	.000	.000

NPar Tests - Kendal's's W Test

Ranks	
	Mean Rank
KEPEMIMP	3.89
KUAL PELAYAN	3.11
MOTIVASI	1.96
Kesad.Masy	1.04
a Kendal's's Coefficient of Concordance	

Test Statistics	
N	72
Kendal's's W(a)	.955
Chi-Square	206.309
Df	3
Asymp. Sig.	.000
a Kendal's's Coefficient of Concordance	

Koefisiensi konkordansi kendal's adalah sebesar 0,955. Guna menguji tingkat kebenarannya maka dilihat dari chi-square terdapat nilai 206,309. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan secara bersama-sama antara kepemimpinan, kualitas

pelayanan, dan motivasi dengan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan tabel di atas maka sumbangan dari ketiga variabel tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$R_{1.2.3.y} = W^2$$

$$W = 0,955$$

$$W^2 = (0,955)^2 = 0,912 \quad \blacktriangleright \quad 91,20 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh } X_1 \ X_2 \ X_3 - Y &= 100 - 91,20 \\ &= 8,80 \% \end{aligned}$$

Mengamati dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pengaruh kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi terhadap kesadaran masyarakat ada pengaruhnya dengan hasil penelitian 91,20 persen. Sedangkan yang lain karena faktor SDM aparat, ekonomi masyarakat, dan lain lain.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak”.

Dalam bab ini, penulis akan mengajukan kesimpulan dan saran-saran dengan harapan agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan guna memenuhi kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga nantinya akan memperlancar jalannya pembangunan.

A. Simpulan

Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Karangtengah sebagian besar bekerja sebagai petani.

Kepemimpinan lurah desa mempunyai pengaruh dan selalu dipatuhi oleh bawahannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan diri dari lurah desa dalam mengatasi masalah di masyarakat sangatlah diharapkan. Mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan secara keseluruhan sudah ada, sedangkan mengenai kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu masih kecil walaupun demikian mereka tetap membayar sesuai dengan tagihan yang harus dibayarkan.

Kualitas pelayanan kepada masyarakat telah menjadi obsesi yang selalu ingin dicapai (Warella 1997) dan berdampak pada berbagai bidang sehingga dapat mempengaruhi mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Masyarakat di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak menjadi tergerak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan berkat dorongan dari lurah desa. Disamping itu lurah desa dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Sedangkan uji hipotesa yang telah dilakukan terhadap data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara kepemimpinan dengan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan,

yang ditunjukkan dengan koefisien rank kendal's sebesar 0,293.

2. Ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kesadaran masyarakat, yang ditunjukkan dengan koefisien rank kendal's sebesar 0,085
3. Ada hubungan antara kepemimpinan dengan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yang ditunjukkan dengan koefisien rank kendal's sebesar 0,176.
4. Ada hubungan antara kepemimpinan dengan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yang ditunjukkan dengan koefisien rank kendal's sebesar 0,955

Sedangkan besarnya pengaruh kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi dengan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sebesar 91,20 persen.

B. Saran - Saran.

Berdasarkan dari simpulan hasil penelitian serta wawancara, selanjutnya dapat disampaikan beberapa saran

yang penulis anggap perlu di dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil kategorisasi variabel kepemimpinan, dan variabel kualitas pelayanan, menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kualitas pelayanan lurah desa dinilai kurang baik. Untuk meningkatkan kepemimpinan dan kualitas pelayanan lurah desa di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak perlu diadakan kursus-kursus atau pelatihan guna menunjang kinerjanya.
2. Upaya meningkatkan pendapatan dari hasil penarikan Pajak Bumi dan Bangunan erat hubungannya dengan kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat antara lain kepemimpinan, kualitas pelayanan, motivasi. Faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh 91,80 % terhadap kesadaran masyarakat. Namun setelah melihat dari hasil penelitian seperti pada tabel IV.35 menyebutkan bahwa frekuensi pemberian ceramah masih dinilai kurang, dan juga pada tabel IV.42 menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Karangtengah kurang dapat merasakan hasil

dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat, diperlukan adanya penambahan frekuensi ceramah atau mungkin faktor-faktor lain, misalnya: komunikasi dengan masyarakat yang perlu diefektifkan, peranan dari perilaku pemimpin yang juga diperhatikan demi tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djamaludin, 1985, *Tehnik Penyusunan Skala Pengukuran*, PPK UGM, Yogyakarta.
- Ivancevich Gibson Donnelly, 1997, *Organisasi*, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Gozali, 1976, *Ilmu Jiwa*, Penerbit Gonaco, Bandung.
- Handoko, T Hani, 1993, *Manajemen*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Simamora, Henry, 1997, *Sumber Daya Manusia*, Penerbit STIE YKPN, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1997, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1988, *Pengantar Metodologi Ressacrh Sosial*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung.
- Koontz, H, O'Donnell, C, Weihrich, 1992, *Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Malayu, S.P. Hasibuan, 1994, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV Haji Masagung, Jakatra.
- Malo, Manasse dan Trisnoningtias, Sri, 1997, *Metodo Penelitian Masyarakat*, Penerbit Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.

- Singarambun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 1989, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mustofadidjaja, AR, 1996, *Format Pemerintahan Menghadapi Abad 21*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi keempat, MIPI, Jakarta.
- Nainggolan, 1984, *Pembinaan Pengawal Negeri Sipil*, Penerbit Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Pamudji, S, 1995, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Ravianto, J, 1990. *Produktivitas dan Seni Usaha*, Lembaga Sarana Inovasi Usaha dan Produktivitas, Jakarta.
- Ravianto, J, 1988. *Modul Dasar-dasar Produktivitas*, Karunika, Jakarta.
- Edgar, Schein, 1991, *Psikologi Organisasi*, Penerbit PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Scool, JW, 1981, *Modernisasi Pengantar Sosiologi*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Sigit, Soehardi, 1983, *Teori Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Armurita, Yogyakarta.

- Siagian, P Sondang, 1987, *Filsafat Administrasi*, Penerbit Haji Masagung, Jakarta.
- Sudamaryanti, 2001, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sugandha, N Dann, 1992, *Kapita Selekta Administrasi*, Penerbit Arcan, Jakarta
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2002, *Statistika untuk Penelitian*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Supranto, J, 2000, *Teknik Sampling*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutarto, 1991, *Dasar-dasar Organisasi*, Gajah Mada University Press, Ygyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1996, *Budaya Pemerintahan dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Kepada Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi ketiga, MIPI, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Prospek Pemerintah Desa Pada Melenium Ketiga*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi keenam, MIPI, Jakarta.
- Wahjosumijo, 1992, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Penerbit Galia Indonesia, Jakarta.

Warella, Y, 1997 Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Ilmu Administrasi FISIP Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Direktorat Jenderal Pajak, 1995, *Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan*, Penerbit PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta.

Program Pasca Sarjana, 2001, *Pedoman Penyusunan Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.